PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RENCANA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(RENJA – PD)
TAHUN 2019

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. SUROHADIKUSUMO NO 1 PEMALANG

2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Dinas, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2019 akhirnya dapat kami susun dengan segala keterbatasan yang ada.

Renja merupakan suatu proses yang berorientasi pada pada hasil yang dicapai pada kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan berbagai potensi dan hambatan yang ada agar dapat mencapai/mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD 2016 - 2021. Renja ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan serta program dan kegiatan yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diharapkan, dengan memperhitungkan capaian yang telah dicapai sampai dengan tahun sebelumnya.

Dalam penyusunan Renja ini masih perlu dimatangkan lagi melalui berbagai kegiatan antar seluruh komponen organisasi agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat sejalan dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD Tahun 2016 – 2021.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2019 untuk dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan seluruh komponen organisasi dalam waktu satu tahun ke depan.

Pemalang, Agustus 2018

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PEMALANG

PEMERINTAH KABUPATEN DISKOMINFO PEMALANG

Drs.NUGROHO BUDI RAHARJO,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610821 198903 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

KEPUTUSAN KEPALA DINAS, KOMUNIKASI DAN – ii

INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG NOMOR 050/ /2018

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL vi

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang ..... I - 1

1.2 Landasan Hukum ..... I - 2

1.3 Sistematika Penulisan ..... I - 5

1.4 Maksud dan Tujuan ..... I - 5

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD ..... II - 1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD ..... II - 14

2.3 Evaluasi Pelaksanaan SPM ..... II - 32

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD ..... II - 35

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal OPD ..... II - 38

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ..... III - 1

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD ..... III - 12

3.3 Program dan Kegiatan OPD ..... III - 17

BAB IV Penutup ..... IV - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2016 Komunikasi dan Informatika	II - 02
Tabel 2.2	Rekapitulasi, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD, Pencapaian Renstra OPD Sampai dengan Tahun 2017 Kabupaten Pemalang	II - 05
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang	II - 27
Tebel 2.4	Hasil Evaluasi SPM bidang Komunikasi dan Informatika	II - 34
Tabel 2.5	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kabupaten Pemalang	II - 40
Tabel 3.1	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Kabupaten Pemalang	III - 21

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang
Nomor : 050.4/ 140 /2018
Tanggal : 27 September 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dalam perkembangannya diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, membawa konsekuensi perubahan serta penyempurnaan mekanisme dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektif.

Perencanaan Pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah - dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang - bertujuan untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, agar perencanaan pembangunan tersebut dapat tersusun dengan baik dan tepat sasaran, maka perlu adanya pedoman Perencanaan Pembangunan.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun dengan memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan

kerangka anggaran. Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang merupakan dokumen yang harus disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, karena Dinas Komunikasi dan Informatika adalah lembaga yang sebagian besar kegiatannya secara langsung berhubungan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga dari dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika inilah akan dapat dilihat seberapa besar perhatian Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2005-2025.

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (lembaran daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021,
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang,
21. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang,
22. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Nomor 050.03/24/Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021

1.3 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2019 disusun bedasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I : **Pendahuluan**, memuat perihal latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II : **Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu**, memuat perihal evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan OPD, dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

BAB III : **Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan PD**, memuat perihal telaahan terhadap Kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja OPD, serta program dan kegiatan.

BAB IV : **Penutup**

1.4 Maksud dan Tujuan

Proses perencanaan membutuhkan kontinuitas untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai penjabaran serta tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2016 - 2021 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2016 - 2021, maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2019. Sebagai suatu dokumen rencana kerja, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Adapun maksud penyusunan Renja SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2019 antara lain adalah :

a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan OPD;
c. Menyediakan acuan resmi bagi OPD dalam menyusun Rencana Anggaran dan Kegiatan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja OPD adalah :

a. Untuk mengukur kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD;
b. Untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah;
c. Untuk mengukur capaian target standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja OPD;
d. Sebagai acuan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pemalang kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD;
e. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Pemalang. Secara de fakto Dinas Komunikasi dan Informatika ada sejak dilantiknya Para Pejabat di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang pada tanggal 3 Januari 2017. Dengan demikian Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang mulai melaksanakan tugasnya sejak tanggal 3 januari 2017.

Tahun 2017, merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang periode 2016-2021. Namun demikian karena Dinas Komunikasi dan Informatika baru dibentuk pada awal tahun 2017, maka Renscana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang juga baru disusun pada Tahun 2017. Adapun Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2017 disusun berdasarkan Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik saat itu. Evaluasi pelaksanaan Kinerja Tahun 2017 antara lain sebagai berikut:

I. Realisasi Program Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
    1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
        a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat realisasi 50%
        b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik realisasi 50%
        c. Penyediaan jasa pemelihaaan dan perizinan kendaraan dinas operasional realisasi 14,92%
        d. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan realisasi 50,46%
        e. Penyediaan jasa keamanan realisasi 0%
    2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
        a. Pengadaan computer dan perlengkapannya realisasi 79,21%
        b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional 80,12%
        c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Perlengkapannya 78,13%

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur
    a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 72,89%
    b. Pengiriman Pegawai pada Seminar, Workshop terkait pelaksanaan Tupoksi 70,34%
4. Program Peningkatan Pngembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
    a. Penyusunan Lporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 74,40%
5. Program Peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD
    a. Penyusunan Data Base Perencanaan SKPD 79,05%
6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
    a. Pengembangan dan Penyelenggaraan Aplikasi Berbagi pakai
7. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Infomasi
    a. Asistensi/Bimbingan Teknis bidang Teknik Jurnalistik 72,89%
8. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
    a. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah 84,72%
    b. Penyebarluasan Informasi yang bersifat Peyuluhan Bagi Masyarakat 75,27%
9. Program Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan komunikasi dan informasi daerah
    a. Penguatan Komunikasi Publik Melalui Website dan SMS Center
    b. Pemberdayaan dan Pemanfaatn E-Goverentment 81,06%
10. Program Peningkatan tata laksana Komunikasi dan Informatika
    a. Komunikasi Publik Melalui Dialog Interaktif Radio dan Televisi 84,07%
    b. Pengelolaan dan Inventarisasi data dan Penyajian Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah 86,02%
11. Program Pengembangan persandian/informasi daerah
    a. Pengamanan komunikasi dan informasi 81,86%

II. Realisasi Program Kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja

1. Program Pelayanan Administrasi Keuangan
    a. Penyediaan Jasa administrasi keuangan 86,61%
    b. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 98,72%
    c. Penyediaan Alat Tulis Kantor 99,51%
    d. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 98,39%
    e. Penyediaan Makanan dan Minuman 86,71%
    f. Rapat-apat koordinasi dan konsultasi di dalam dank e luar daerah 94,49%
2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
    a. Pengadaan Mebeleur 95,23%
    b. Pengadaan Alat-alat Elektronik 97,03%

c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 99,93%

d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 99%

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

   a. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 84,41%

4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

   a. Penyelenggaraan Ekosistem Smart City 89,01%

   b. Pengelolaan nama domain dan sub domain daerah 98,82%

   c. Pengelolaan infrastruktur e-government,data dan informasi terintegrasi 88,98%

5. Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika

   a. Sosialisasi Kehumasan bagi aparatur pemerintah kabupaten pemalang 93,05%

6. Program Kerjasama informasi dengan mas media.

   a. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 91,73%

7. Program Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi daerah

   a. Revitalisasi Pendayagunaan Media Center daerah 94,79%

   b. Pengutan Kelembagaan Pengelolaan informasi public 98,71%

   c. Penyelenggaraan Government CIO 94,22%

8. Program Peningkatan tata laksana komunikasi dan informasi

   a. Pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster,leaflet,baleho dll 97,87%

   b. Dokumentasi dan publikasi program/ kegiatan SKPD 99,25%

   c. Pemberian informasi publik melalui iklan layanan masyarakat (adventorial) 99,43%

9. Program Pembangunan data/informasi/statistik daerah

   a. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 97,29%

10. Program Pengembangan persandian/informasi daerah

    a. Penyelenggaraan keamanan informasi 90,38%

III. Realisasi Program Kegiatan yang melebihi target Kinerja hasil/ukuran yang direncanakan

Program kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ukuran yang direncanakan tidak ada

IV. Faktor penyebab tidak tercapainya target terpenuhinya atau melebihi target

a. Kurangnya kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia
b. Kurang cermat dalam menyusun perencanaan kegiatan
c. Adanya kebijakan administrasi perkantoran berbasis paperless
d. Berkurangnya target pemasangan mesin absensi dari 161 unit menjadi 99 unit karena gagal lelang

V. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

Tidak tercapainya target capaian kinerja tentunya berimpilkasi terhadap target capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021. Beberapa target kinerja yang tidak tercapai mengakibatkan beberapa target capaian program juga tidak tercapai.

VI. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lebih cermat dalam menyusun perencanaan
2. Mengusulkan penambahan sumberdaya manusia

2.2.1. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang. Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.

2. Fungsi

Didalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

3. Kewenangan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016, bahwa kewenangan desentralisasi yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang adalah :

a. bidang komunikasi dan informatika.

b. Bidang persandian.

c. Bidang statistik

4. Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang pada Bagian Ketiga, menyebutkan bahwa Susunan Organisasi Dinas, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

a. Kepala Dinas,
b. Sekretariat terdiri dari
    1. Subbagian Bina Program dan Keuangan,
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian,
c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdm dan
    1. Seksi Informasi Publik,
    2. Seksi Komunikasi Publik,
d. Bidang Penyelenggaraan *E-Government* terdiri dari
    1. Seksi Pengelolaan Infrastruktur *E-Government*,
    2. Seksi Pengelolaan Aplikasi *E-Government*,
e. Bidang Pos, Telekomumkasi dan Statistik terdiri dari
    1. Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian;
    2. Seksi Statistik,
f. UPTD,
g. Kelompok Jabatan Fungsional

LAMPIRAN ---
PERATURAN DAERAH KABUPATENPEMALANG
NOMOR 13 TAHUN 2016
TANGGAL 22 AGUSTUS 2016

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PEMALANG

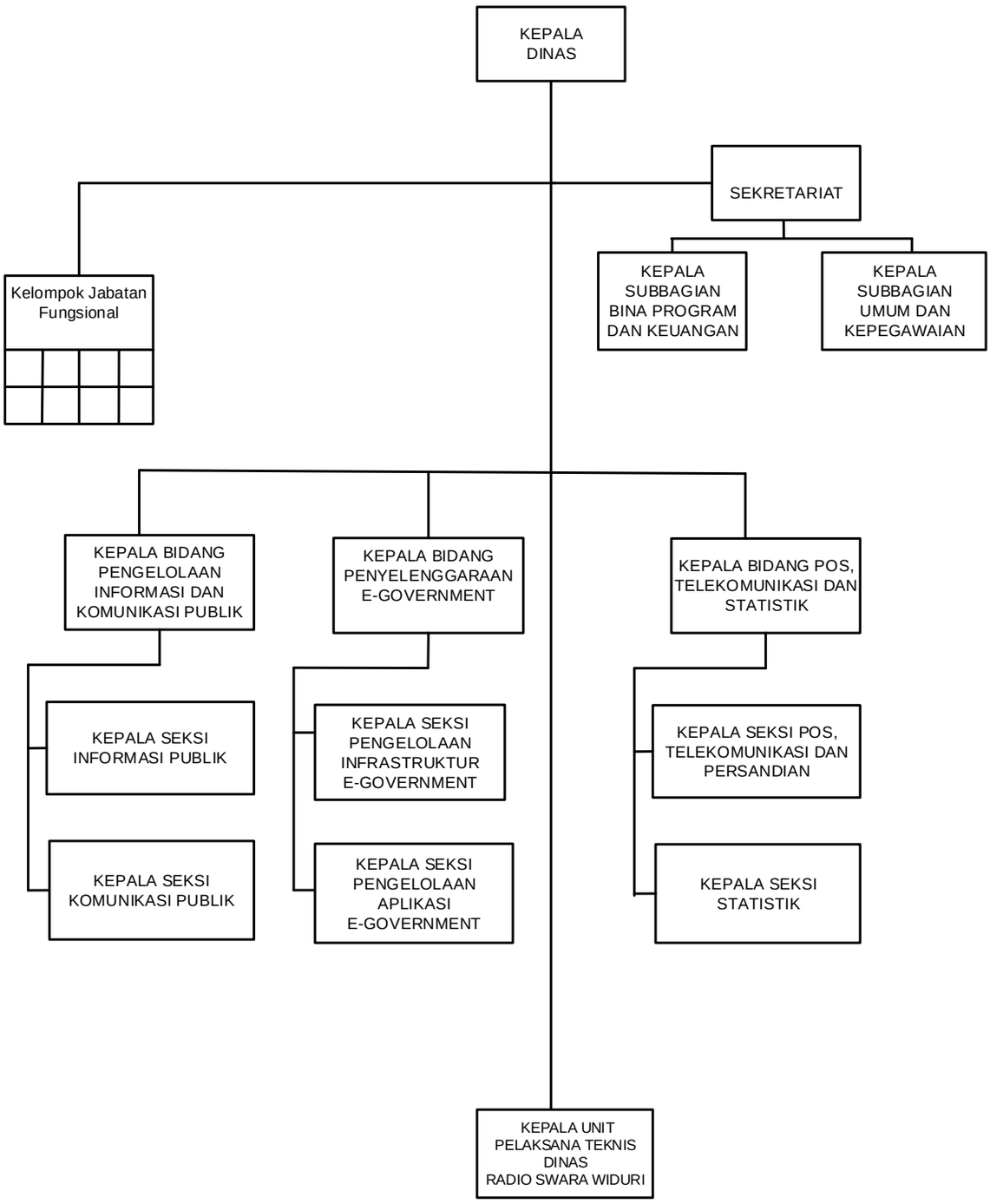

NB. Dasar pembuatan
1. FGD di surakarta
2. Perumpunan Urusan dan Urtug berdasarkan pp 18/2016

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Uraian Tugas Pejabat Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika

A. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kepala Dinas komunikasi dan Informatika mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat dengan mengacu pada Rencana Keija Pemenntah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman penyusunan Rencana Keija dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
2. merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemenntahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan,
3. merumuskan kebijakan tekms urusan pemenntahan bidang komunikasi dan mformatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai dengan program dan kegiatan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
4. mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik agar penyelenggaraannya sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
5. merumuskan inovasi daerah urusan pemenntahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat berdasarkan hasil analisa dan atau pemanfaatan teknologi guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
6. mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan urusan pemerinntahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai kebutuhan pelayanan publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik,
7. mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemenntahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi,
8. mengarahkan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang komumkasi dan mformatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
9. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemenntahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. merumuskan laporan di bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

B. Sekretaris

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2. mengkoordinasikan usulan Rencana Strategic (Renstra), Rencana Kinerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemenntah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan,
3. menyusun rancangan kebijakan kesekretanatan sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
4. menyelenggarakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
5. mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik,
6. menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemenntah (SPIP) urusan pemenntahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemenntah (SPIP) dalam rangka pengendalian internal kegiatan,
7. menyusun konsep inovasi kesekretariatan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
8. mengoordinasikan konsep inovasi dan pelaksanaan tugas bidang-bidang guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
9. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretanatan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
I0. mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan mformatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat berdasarkan basik laporan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
11 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

a. Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1) merencanakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2) menyusun usulan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) urusan pemerintahan komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan,
3) melaksanakan pengelolaan administrasi bina program dan keuangan sesuai dengan pedoman perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah guna tertib admimstrasi,

4) mengelola data urusan pemerintahan komunikasi dan mformatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah guna pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah,
5) melaksanakan kegiatan venfikasi dan pencairan anggaran sesuai surat pertanggungjawaban keuangan guna pengendalian pengelolaan keuangan,
6) menyusun konsep dokumen pertanggungjawaban kinerja yang meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjlP), Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dokumen pertanggung]awaban lainnya sesuai dengan panduan pembuatan laporan sebagai bahan pertanggung]awaban,
7) menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), serta laporan keuangan lainnya sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi,
8) menyiapkan bahan inovasi Subbagian Bina Program dan Keuangan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik,
9) melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP**)** urusan pemerintahan komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemenntah (SPIP) dalam rangka pengendalian internal kegiatan,
10) mengevaluasi pelaksanaan tugas Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
11) menyusun bahan laporan urusan pemerintahan komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat berdasarkan hasil laporan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,
12) menyusun laporan pelaksanaan tugas di lgkungan Subbagian Bina Program dan Keuangan secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
13) melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1) merencanakan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2) mengelola admimstrasi umum meliputi surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan secara efektif guna kelancaran pelaksanaan tugas,
3) mengelola administrasi kehumasan meliputi keprotokolan dan informasi publik secara efektif guna kelancaran pelaksanaan tugas,
4) mengelola administrasi kerumahtanggaan meliputi pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan, keamanan kantor, fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas, dan barang milik daerah secara efektif guna kelancaran pelaksanaan tugas,
5) mengelola ketatalaksanaan meliputi penyusunan sistem dan prosedur kebijakan sesuai dengan target kerja guna kelancaran pelaksanaan tugas,
6) mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan kepegawaian guna tertib administrasi,
7) melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik,

8) menyiapkan bahan inovasi Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekeijaan dan memngkatkan kualitas pelayanan publik,
9) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kmeija,
10) menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

C. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1) merencanakan program dan kegiatan Bidang Informasi Publik dan Komunikasi Publik sesuai pedoman pelaksanaan dan kebutuhan orgamsasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2) menyusun konsep rancangan kebijakan Bidang Informasi Publik dan Komunikasi Publik sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
3) menyelenggarakan program dan kegiatan Seksi Informasi Publik dan Seksi Komunikasi Publik sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar tepat sasaran dan tujuan,
4) menyusun konsep inovasi urusan pemenntah bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan ketentuan dan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,
5) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik secara penodik dan terpadu guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
6) mengevaluasi pelaksanaan tugas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
7) menyusun laporan pelaksanaan tugas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
8) melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

a. Kepala Seksi Informasi Publik

Kepala Seksi Informasi Publik mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1) merencanakan program dan kegiatan pada Seksi Informasi Publik sesuai pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2) menyusun konsep rancangan program dan kegiatan pada Seksi Informasi Publik sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
3) menyusun rancangan kebijakan Seksi Informasi Publik sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
4) menyusun konsep rancangan Rencana Induk Strategi Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai petunjuk pelaksanaan pembangunan,
5) melaksanakan. pengelolaan informasi publik serta hubungan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah sesuai prosedur dan Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan untuk mewujudkan efektifitas saluran informasi publik serta hubungan masyarakat dengan Pemerintah Daerah,

6) melaksanakan kegiatan reproduksi informasi nasional sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan keselarasan antara informasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
7) melaksanakan kegiatan pelayanan, fasilitasi dan penyebarluasan informasi dan dokumentasi sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik,
8) melaksanakan diseminasi informasi nasional sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna penyebaran informasi,
9) melaksanakan pengelolaan pemutakhiran materi dan konten situs Pemenntah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna pemutakhiran informasi publik,
10) melaksanakan publikasi kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna penyebarluasan informasi,
11) menyusun rancangan inovasi Seksi Informasi Publik berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
12) mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Informasi Publik sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
13) menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Informasi Publik secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
14) melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

b. Kepala Seksi Komunikasi Publik

Kepala Seksi Komunikasi Publik mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1) merencanakan program dan kegiatan pada Seksi Komunikasi Publik sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana keija dan anggaran,
2) menyusun rancangan kebijakan Seksi Komunikasi Publik sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
3) menyusun konsep rancangan Rencana Induk Strategi Informasi dan Komumkasi Publik sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai petunjuk pelaksanaan pembangunan,
4) melaksanakan pengelolaan komunikasi publik serta hubungan masyarakat Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan efektifitas saluran komunikasi publik serta hubungan masyarakat Pemerintah Daerah,
5) melaksanakan kegiatan audit komunikasi publik sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mengontrol komunikasi publik,
6) melaksanakan kegiatan kemitraan komunikasi dengan media sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan untuk meningkatkan kerjasama,
7) melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya komunikasi perangkat daerah dan badan usaha milik daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk meningkatkan kapasitas,
8) melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Daerah maupun masyarakat sesuai dengan prosedur teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kapasitas sumber daya TIK,

9) melaksanakan pengelolaan saluran komunikasi milik Pemenntah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna efektifitas dan efisiensi komunikasi publik,
10) melaksanakan kegiatan pembinaan saluran komunikasi non pemenntah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pengelolaan saluran komunikasi non pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan,
11) melaksanakan kegiatan pembinaan kelembagaan komunikasi sosial sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan komunikasi sosial,
12) menyusun rancangan inovasi Seksi Komunikasi Publik berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
13) mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Komunikasi Publik sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kmerja,
14) menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Komunikasi Publik secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
15) melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

D. **Kepala Bidang Penyelenggaraan *E-Government***

Kepala Bidang Penyelenggaraan *E-Government* mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1) merencanakan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Infrastruktur E-Government dan Pengelolaan Aplikasi *E-Government* sesuai pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kinerja dan anggaran,
2) menyusun konsep rancangan kebijakan Bidang Pengelolaan Infrastruktur E-Government dan Pengelolaan Aplikasi *E-Government* sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
3) menyelenggarakan program dan kegiatan Seksi Pengelolaan Infrastruktur E-Government dan Seksi Pengelolaan Aplikasi *E-Goverment* sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar tepat sasaran dan tujuan,
4) menyusun konsep inovasi urusan pemerintah Bidang Penyelenggaraan *E-Government* sesuai dengan ketentuan dan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,
5) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan *E- Goverment* secara periodik dan terpadu guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
6) mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan *E-Government* sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
7) menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan *E- Government* secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
8) melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

a. Kepala Seksi Pengelolaan Infrastruktur *E-Government*

Kepala Seksi Pengelolaan Infrastruktur *E-Goverment* mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan program dan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Infrastruktur *E-Government* sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2. menyusun rancangan kebijakan Seksi Pengelolaan Infrastruktur *E-Government* sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

3. menyusun konsep rancangan Rencana Induk *E-Goverment* sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan sebagai petunjuk pelaksanaan pembangunan,
4. melaksanakan pengelolaan *E-Government* Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan untuk mewujudkan tata kelola *E-Government* yang baik,
5. melaksanakan pengelolaan infrastruktur dasar Pusat Data (Data Center), *Disaster Recovery Center* dan Teknologi Informatika dan Komputer (TIK) Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan standar minimal penyelenggaraan *E-Government,*
6. melaksanakan pengelolaan intranet Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan komunikasi data yang baik antar perangkat daerah,
7. menyiapkan penyediaan layanan akses internet dan intranet sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan guna penyebaran akses informasi,
8. melaksanakan pengembangan infrastruktur teknologi dan komunikasi komputer (TIK) sesuai dengan ketentuan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mendukung pengembangan *E-Government,*
9. melaksanakan kegiatan penyusunan Standar Sistem Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna. penyelarasan sumber daya teknologi dan komunikasi komputer (TIK) Pemermtah Daerah,
10. menyusun rancangan inovasi Seksi Pengelolaan Infrastruktur *E- Government* berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekeijaan dan memngkatkan kualitas pelayanan publik,
11. mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Infrastruktur *E-Government* sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
12. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Infrastruktur *E-Government* secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpiman sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

b. Kepala Seksi Pengelolaan Aplikasi *E-Govemment*

Kepala Seksi Pengelolaan Aplikasi *E-Govemment* mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1) merencanakan program dan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Aplikasi *E-Govemment* sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana keija dan anggaran,
2) menyusun rancangan kebijakan Seksi Pengelolaan Aplikasi *E- Government* sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
3) menyusun konsep rancangan Rencana Induk *E-Government* sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan sebagai petunjuk pelaksanaan pembangunan,
4) melaksanakan pengelolaan nama domain dan sub domain situs Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna penyelarasan dengan ketentuan Pemerintah Pusat,
5) melaksanakan pengelolaan interoperabilitas dan interkoneksi aplikasi dan database *E-Government* Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam memanfaatkan *E-Goverment,*

6) melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pemerintah Daerah yang terintegrasi,
7) melaksanakan pengelolaan dan pengembangan aplikasi generik, spesifik dan suplemen sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan integrasi aplikasi,
8) melaksanakan pengelolaan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sesuai dengan ketentuan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan *Smart City,*
9) melaksanakan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan tata kelola *E-Goverment* yang baik,
10) melaksanakan pengelolaan Situs Web Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mendukung penyelenggaraan layanan informasi dan komunikasi publik yang baik,
11) melaksanakan pengelolaan aplikasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara elektronik (e-LPPD) sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam penyusunan pelaporan,
12) menyusun rancangan inovasi di lmgkungan Seksi Pengelolaan Aplikasi *E-Govemment* berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
13) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pengelolaan Aplikasi *E-Govemment* sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
14) menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Aplikasi *E-Govemment* secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
15) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

E. Kepala Bidang Pos, Telekomunikasi dan Statistik

Kepala Bidang Pos, Telekomumkasi dan Statistik mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. merencanakan program dan kegiatan bidang Pos, Telekomunikasi dan Persandian serta bidang Statistik sesuai pedoman pelaksanaan dan kebutuhan orgamsasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2. menyusun konsep rancangan kebijakan bidang Pos, Telekomunikasi dan Persandian serta bidang Statistik sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
3. menyelenggarakan program dan kegiatan Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian serta Seksi Statistik sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar tepat sasaran dan tujuan,
4. menyusun konsep inovasi urusan pemenntah Bidang Pos, Telekomunikasi dan Statistik sesuai dengan ketentuan dan perkembangan teknologi untuk memngkatkan kualitas pelayanan publik;
5. mengkoordmasikan pelaksanaan tugas Bidang Pos, Telekomunikasi dan Statistik secara penodik dan terpadu guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
6. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pos, Telekomunikasi dan Statistik sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
7. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pos, Telekomunikasi dan Statistik secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

a. Kepala Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian

Kepala Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan program dan kegiatan pada Seksi Pos, Telekomumkasi dan Persandian sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2. menyusun rancangan kebijakan Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
3. menyusun konsep rancangan Rencana Induk Pola Hubungan Komunikasi Sandi dan Pengamanan Informasi sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai petunjuk pelaksanaan pembangunan,
4. melaksanakan pengendalian dan penertiban terhadap penyelenggaraan standardisasi dan perizinan pos dan telekomunikasi di daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna peningkatan pelayanan publik;
5. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan hubungan komunikasi sandi dan pengamanan mformasi yang bersifat lokal sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan guna peningkatan pengetahuan dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pos, telekomunikasi dan persandian,
6. melaksanakan pengelolaan keamanan mformasi *E-Government* sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan keamanan komunikasi data Pemerintah Daerah,
7. melaksanakan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan akuntabilitas pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah,
8. mengoordinasikan penetapan, pemberlakuan dan penghapusan kunci sistem sandi sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk pengamanan,
9. melaksanakan kegiatan tata kelola dan perlindungan informasi berklasifikasi sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk pengamanan informasi,
10. melaksanakan kegiatan penyiapan, pemanfaatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Sandi, Materiil Sandi dan Jaring Komunikasi Sandi (JKS) baik melalui asistensi, workshop, pelatihan, seminar dan/atau bimbingan teknis persandian sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk peningkatan kualitas kerja
11. melaksanakan pengelolaan pusat data persandian sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna ketersediaan informasi publik
12. melaksanakan kegiatan pengukuran dan evaluasi penyelenggaraan persandian dan tmgkat keamanan informasi secara internal pada masing-masing perangkat daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk menjaga informasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah,
13. melaksanakan pengelolaan materiil, sarana, prasarana dan infrastruktur persandian untuk pengamanan informasi dengan berpedoman pada Peraturan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Sandi Negara untuk kelancaran pelaksanaan tugas,
14. melaksanakan pelayanan satu pintu pengiriman dan penerimaan informasi berklasifikasi di lmgkungan pemerintah daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk efektivitas pelaksanaan kerja,
15 mengelola kegiatan pemulihan data dan gangguan jaringan sistem informasi dengan menjaga integntas dan ketersediaan data,

16 mengelola Secunty Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna perlindungan data,
17 menyusun rancangan inovasi Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
18 mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
19 menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
20 melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan oleh pimpinan esuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

b Kepala Seksi Statistik

Kepala Seksi Statistik mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1 menyusun konsep rancangan program dan kegiatan pada Seksi Statistik sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2 menyusun rancangan kebijakan Seksi Statistik sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
3 mengindentifikasi data, dokumen, bahan dan peralatan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan survey pengelolaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk keterpaduan data dalam pelaksanaan survey,
4 menyusun metode survey dan petunjuk tekms pelaksanaan survey sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk memperoleh hasil survey yang akurat,
5 melakukan konsultasi dan mengkoordinasikan persiapan penyelenggaraan survey pengelolaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna keterpaduan pelaksanaan kegiatan,
6 melaksanakan kegiatan statistik sektoral di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk memperoleh data statistik sektoral yang valid dan akurat,
7 menyusun data hasil survei pengelolaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan sistem dan program yang ditetapkan untuk diolah menjadi laporan hasil survey,
8 mempersiapkan bahan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan survei pengelolaan urusan pemermtahan yang menjadi kewenangan daerah untuk menjadi bahan masukan dan perbaikan kegiatan survei maupun kebijakan pada masa akan datang,
9 mengidentifikasi konsep pengembangan metodelogi survei, diseminasi statistik dan sistem informasi pengelolaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka meningkatkan mutu data statistik,
10 menyusun rancangan inovasi Seksi Statistik berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
11 mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Statistik sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
12 menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Statistik secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
13 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

2.3. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

1. Sumber Daya Manusia

Per tanggal 30 Juni 2018 Personil pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan struktur :

1) Jumlah Struktural :

a) Eselon II/B : 1 orang

b) Eselon III/A : 1 orang

c) Eselon III/B : 3 orang

d) Eselon IV/A : 8 orang

2) Jumlah Pelaksana :

Pelaksana : 31 orang

b. Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang, terdiri dari :

1) Pembina Tingkat I (IV/b) : 2 orang

2) Pembina (IV/a) : 2 orang

3) Penata Tingkat I (III/d) : 6 orang

4) Penata (III/c) : 1 orang

5) Penata Muda Tingkat I (III/b) : 14 orang

6) Penata Muda (III/a) : 5 orang

7) Pengatur Tingkat I (II/d) : 1 orang

8) Pengatur (II/c) : 6 orang

9) Pengatur Muda Tingkat I (II/b) : 5 orang

10) Pengatur Muda (II/a) : 2 orang

1) Sarjana Strata 2 : 2 orang

2) Sarjana Strata 1/Diploma IV : 17 orang

3) Diploma III : 1 orang

4) SLTA : 24 orang

c. Sedangkan Tenaga/Pegawai Honorer pada Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

1) Petugas fotografer : 1 orang

2) Petugas Administrasi Kantor : 7 orang

3) Petugas Penyiar Radio : 7 orang

4) Marketing radio : 3 orang

5) Penjaga server : 2 orang

6) Programer : 2 orang

7) Penjaga gedung radio : 2 orang

8) Petugas IT : 13 orang

Dari keseluruhan pegawai (PNS) apabila dilihat dari struktur kepangkatan dan tingkat pendidikan, maka SDM Dinas Komunikasi dan Informatika cukup representatif, dimana 70 % pegawai bergolongan III, dan 60 % berpendidikan SLTP – SLTA.

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Untuk dapat memberikan pelayanan yang baik, kinerja aparat/petugas dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang didukung dengan adanya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana tersebut diantaranya Studio Radio Swara Widuri, dan peralatan kamera dan tustel. Selain itu juga beberapa unit komputer sebagai sarana pendukung administrasi perkantoran. Sedangkan prasarana yang ada berupa Gedung Kantor Pelayanan Administrasi, dan Gedung LPPL Swara Widuri.

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Dinas, Komunikasi dan Informatika didukung sebagai berikut :

Tabel 2.1

Sumber Daya Sarana dan Prasana Tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Jenis	Jumlah
1	Komputer PC	125 unit
2	Laptop	26 unit
3	LCD/proyektor attachment	7 unit
4	Telepon	5 unit
5	Televisi	12
6	AC unit	20
7	AC Split	11
8	Almari besi	5
9	Almari kaca	4
10	Almari kayu	4
11	Meja Kerja Eselon II	1
12	Meja Kerja pejabat lainnya	3
13	Meja Rapat	18
14	Meja Tulis	16
15	Meja telephone	1
16	Meja Resepsionis	3
17	Meja Komputer	49
18	Meja biro	57
19	Meja Operator	2
20	Meja tamu eselon II	1
21	Meja tamu eselon III	4
22	Kursi besi (metal)	13

23	Kursi kayu bambu	11
24	Kursi Rapat	34
25	Kursi tangan	13
26	Kursi putar	4
27	Kursi biasa	74
28	Kursi lipat	10
29	Genset	2
30	Mesin bor lainnya	1
31	Avometer SU	2
32	Mesin Tik manual	7
33	Mesin fotokopi	1
34	Rak besi (metal)	4
35	Rak kayu	4
36	Filling Cabinet	25
37	Kendaraan Roda-4 (stasiun wagon)	7
38	Kendaraan Roda-2	12
39	Brankas	1
40	Papan Visual	1
42	Alat Penghancur kertas	2
43	Papan Tulis	5
44	White board	3
45	Mesin absensi	161
46	Overhead Proyektor	1
47	Alat kantor lainnya	8
48	Zice	2
49	Sofa	2
50	Jam mekanis	1
51	Lemari es	2
52	Kipas angina	4
53	Kompor gas	1
54	Amplifier	2
55	Loudspeaker	6
56	Sound Sistem	1
57	Wireless	2
58	Mikropone	4
59	Step Up/Down	2
60	Kamera video	5
61	Kamera Film	1
62	Tustel	9
63	Kaca hias	1
64	Dispenser	5

65	Mimbar / Podium	2
66	Handy cam	3
67	Alat rumah tangga lainnya	6
68	Alat pemadam portable	2
69	Local area network (LAN)	1
70	Internet	2
71	Card reader	94
72	Hard disk	7
73	Peralatan komputer mainframe lainnya	2
74	Printer	54
75	Scanner	3
76	Monitor	7
77	Peralatan personil computer lainnya	6
78	Server	9
79	Router	1
80	HUB	3
81	Peralatan jaringan lainnya	44
82	Meja kerja pegawai non structural	3
83	Compact disk player	3
84	Disk record player	5
85	Headphone	38
86	Microphone wireless/mic	2
87	Unintemuptible power supply (UPS)	2
88	Battery charger	4
89	Enconder/decorder	1
90	Audio cassete recorder	2
91	Digital audio tape recorder	2
92	Peralatan studio visual lain-lain	18
93	Peralatan studio video dan film lainnya	52
94	Camera elektronik	4
95	Video tape recorder stationer	1
96	Video mixer	1
97	Video switcher	1
98	Tripod camera	5
99	Lighting stand tripod	1
100	Film projector	2
101	Camera film	4
102	Lensa camera	2
103	Mixer PRC	1
104	Layar film	1
105	Lighting head body	4

106	Camera vertical	1
107	Handphone	11
108	Alat komunikasi lainnya	4
109	Megaphone	2
110	Handy talking	4
111	Unit transceiver stationary	2
112	Alat komunikasi radio HF/FM	24
113	Unit transceiver UHV portable	30
114	Alat komunikasi social lainnya	1
115	Unit pemancar VHF/FM stationary	1
116	Alat pemancar VHF/FM lainnya	1
117	Antena VHF/FM portable	1
118	Switcher/menara antenna lainnya	2
119	Bangunan gedung kantor permanen	3
120	Bangunan gedung kantor lainnya	5
121	Bangunan pagar keliling	1
122	Bangunan menara telekomunikasi lain-lain	12
123	Instalasi penangkal petir manual	1
124	Perangkat lunak system operasional	15
125	Kamera drone	2
126	Camera	22

2.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

1. SPM bidang Komunikasi dan Informatika

SPM yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang yakni jenis pelayanan dasar Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional dan Pengembangan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.

Tabel.2.2

Hasil Evaluasi SPM bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2017

No	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Tahun					Status
		Indikator	Nilai		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui :	100	2020						
		a. Media Massa seperti majalah, radio, dan televisi;	12x /th	2020	1	1	1	1	1	
		b. Media baru seperti website (media onilne);	Setiap hari	2020	4	4	4	4	4	OK
		c. Media tradisionil seperti pertunjukan rakyat;	12x /th	2020	1	1	1	1	1	

		d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya;	12x /th	2020	1	1	1	1	1	OK
		e. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho;	12x /th	2020	3	3	3	3	3	OK
2	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Keompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan	%	2020	14	14	14	14	14	OK

SPM Urusan Komunikasi dan Informatika terbagi atas 6 indikator. Dari 6 indikator yang telah ditetapkan pada Tahun 2017, sebanyak 4 indikator telah mencapai target SPM, sedangkan 2 indikator belum mencapai target.

2.5. Evaluasi terhadap Indikator Kinerja Daerah pada RPJMD

Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pemalang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021. Target dan Realisasi Capaian indikator kinerja daerah untuk Urusan Komunikasi dan Informatika Statistik yakni Cakupan Pelayanan TI bagi masyarakat (titik hotspot telah tercapai 4 titik yakni di RTH Taman Patih Sampun, Gandulan Cullinarry Center, RTH Comal dan RTH Moga.

2.6. Evaluasi Target Anggaran, Realisasi dan Pelaksanaan Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik

Target Anggaran Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 sebesar Rp. 22.045.767.000 Adapun realisasinya sebesar RP. 19,566,678,118. Anggaran tersebut untuk mendukung 10 program dan 47 kegiatan. Program prioritas RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2017 untuk urusan Komunikasi dan Informatika yakni Cakupan Pelayanan TI bagi masyarakat (titik hotspot telah tercapai 4 titik yakni di RTH Taman Patih Sampun, Gandulan Cullinary Center, RTH Comal dan RTH Moga.

Target anggaran Urusan Statistik sebesar RP. 432.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 420,282,152 atau 97.29%. Dan target Urusan Persandian sebesar Rp. 572,233,000 dengan realisasi Rp.70,367,300 atau 87,70 %.

3.1. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Sejauhmana tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat daerah dan Hal Kritis yang terkait Pelayanan Perangkat Daerah

   Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang tahun 2017 masih cukup optimal dalam meningkatkan pelayanan public Pemerintah Kabupaten Pemalang. Namun demikian masih terdapat indicator kinerja yang belum dapat dipenuhi menyangkut integrase Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yakni E-Planning, E-Budgeting dan E-Monev yang pada Tahun 2017 belum terealisasi.

2. Permasalahan dan Hambatan

   Secara umum Dinas komunikasi dan informatika pada tahun 2017 menghadapi permasalahan antara lain:

   1. Urusan Komunikasi dan Informatika

   a. belum meratanya akses masyarakat terhadap informasi;
   b. masih kurangnya sarana dan prasarana komunikasi dan informatika;
   c. belum meratanya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat terhadap teknologi informasi.
   d. belum adanya regulasi pengembangan E-Goverment Pemerintah Kabupaten Pemalang
   e. belum terintegrasinya data sistem elektronik pemerintah Kabupaten Pemalang
   f. belum terintegrasinya pengelolaan aplikasi di lingkungan SKPD/OPD Pemerintah Kabupaten Pemalang

   2. Urusan Persandian

   a. Masih kurangnya kesadaran keamanan informasi pejabat negara dan Aparatur Sipil Negara;
   b. Adanya kerawanan dan ancaman perusakan sistem komunikasi elektronik, aplikasi server dan data center;
   c. Adanya kerawanan dan ancaman keamanan jaring komunikasi pejabat negara dan OPD Pemerintah Kabupaten Pemalang
   d. Terbatasnya fasilitas peralatan persandian

3. Urusan Statistik

a. Kurangnya kesadaran masyarakat arti pentingnya data;

b. Terbatasnya/sulitnya akses data pembangunan;

c. Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data statistik sektoral.

3. Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian dan program nasional/internasional seperti NSPK, SPM, SDGs

Masih banyaknya persoalan dan adanya indicator kinerja yang belum dapat dipenuhi mengakibatnya beberapa capaian Visi dan Misi Bupati Pemalang belum dapat tercapai. Demikian pula pada pencapaian NSPK dan SPM ada yang belum memenuhi target. Adapun terkait Indikator SDGs, ada beberapa indikator yang telah memenuhi target, antara lain:

a. Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan 100 %

b. Presentase SKPD yang mengembangkan Teknologi Informasi 60 %

c. Presentase SKPD telah menyusun peraturan layanan informasi public 100 %

d.Presentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi 100 %

e. Presentase Penduduk yang terlayani mobile broadband 95 %

f. Presentase penduduk yang menggunakan internet 95 %.

4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

a. Tantangan

- Tuntutan masyarakat terhadap kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informatika
- Maraknya informasi hoak

b. Peluang

Industri Teknologi Komunikasi dan Informatika yang semakin maju dan berkembang, menjadikan peluang masyarakat untuk mengakses informasi semakin terbuka.

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis yang untuk ditindaklanjuti

a. Kualitas koneksi jaringan perlu untuk ditingkatkan

b. Kualitas Konten website Pemerintah kabupaten Pemalang perlu untuk ditingkatkan.

c. Integrasi aplikasi pemerintahan harus segera dilaksnakan

d. Kualitas pelayanan informasi public harus ditingkatkan.

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian (%)		Proyeksi (%)		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui :	SPM										
2	f. Media Massa seperti majalah, radio, dan televisi;	SPM		1	1	1	1	0	0	1	1	
3	g. Media baru seperti website (media onilne);	SPM		4	4	4	4	4	4	4	4	
4	h. Media tradisionil seperti pertunjukan rakyat;	SPM		1	1	1	1	0	0	1	1	
5	i. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya;	SPM		1	1	1	1	1	1	1	1	
6	j. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho;	SPM		3	3	3	3	3	3	3	3	
7	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Keompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan	SPM		14	14	14	14	14	14	14	14	
8	Banyaknya jaringan komunikasi SKPD			40	40	40	40	40	48	48	48	
9	Jumlah Penyiaran Radio/Pengawasan Isi Siaran Radio			10	11	11	11	11	11	11	11	
10	Persentase SKPD telah memiliki Website			20	40	56	72	84	100	100	100	
11	Tersedianya Data Center			20	40	60	80	100	40	60	80	
12	Jumlah Dokumen Kabupaten Pemalang dalam angka			100	100	100	100	100	100	100	100	
13	Jumlah dokumen Kecamatan			100	100	100	100	100	100	100	100	

	dalam angka											
14	Jumlah Dokumen PDRB Kabupaten Pemalang			100	100	100	100	100	100	100	100	
15	Jumlah Dokumen PDRB Kecamatan			100	100	100	100	100	100	100	100	
16	JUmlah dokumen Indeks Harga KOnsumen dan Laju Inflasi Kabupaten Pemalang			100	100	100	100	100	100	100	100	
17	Jumlah dokumen NTP Kabupaten Pemalang			100	100	100	100	100	100	100	100	
18	Persentase informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait			100	100	100	100	100	100	100	100	

1.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu dan Masalah Mendesak

Isu dan permasalahan mendesak saat ini berkenaan dengan urusan komunikasi dan informatika, persandian dan statistik di wilayah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya kualitas koneksi jaringan
b. Kurangnya kualitas konten website Pemerintah daerah
c. Belum semua sistem aplikasi pemerintah daerah terintegrasi
d. Kurangnya kualitas penyelenggaraan KIP

Adapun permasalahan terkait Urusan statistik antara lain:

Keterlambatan penyediaan data statistik yang digunakan untuk menyusun dokumen perencanaan

Permasalahan Urusan Persandian yakni:

Jumlah SDM dan Sarana Prasarana penunjang layanan kriptografi masih terbatas

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses Rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 berdasarkan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2019 yang telah disusun berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Pemalang (RPJMD 2016 - 2021) yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam menyusun Rancangan Renja SKPD juga mendasari pada Renstra PD 2016 – 2021 yang telah disahkan pula. Hal tersebut sebagai dasar dalam penyusunan program dan kegiatan pada Rancangan Awal RKPD 2019 dimana besarnya anggaran yang direncanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika disesuaikan dengan kebutuhan dari kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selaku lembaga yang melayani komunikasi dan informatika, persandian dan statistik di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan Renstra OPD.

a. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

   Usulan Program dan kegiatan masyarakat yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten diperoleh melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kecamatan dan Kabupaten. Hasil Musrenbang Kecamatan berupa Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan Non Fisik disampaikan oleh masing-masing delegasi kecamatan pada saat Forum SKPD/Musrenbang Kabupaten yang dislenggarakan pada tanggal 26 Pebruari 2018. Terdapat beberapa usulan dari delegasi kecamatan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang semuanya hamper sama yakni pelatihan computer untuk masyarakat khususnya pemuda. Adapun rincian usulan sebagai berikut:

   1. Kecamatan Moga
      Pelatihan Komputer untuk Desa Kebanggan dan Desa Moga
   2. Kecamatan Belik
      Pelatihan Komputer untuk Desa Mendelem dan Gunungtiga
   3. Kecamatan Watukumpul
      Pelatihan Komputer untuk Desa Jojogan dan Desa Pagelaran
   4. Kecamatan Randudongkal
      Pelatihan Komputer untuk Desa Gembyang dan Desa Lodaya
   5. Kecamatan Ampelgading
      Pelatihan Komputer untuk Desa Blimbing
   6. Kecamatan Ulujami
      Pelatihan Komputer untuk Desa Limbangan, Pesantren dan Ambowetan
   7. Kecamatan Warungpring

Pelatihan Servis Komputer untuk Desa Datar

Usulan masyarakat melalui Musrenbang baik di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten tersebut selaras dengan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang yang ke-5 yakni pemberdayaan masyarakat di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Oleh karena itu usulan tersebut dapat ditampung untuk selanjutnya direncanakan dalam kegiatan pada Tahun 2019. Adapun jumlah peserta pelatihan nantinya akan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Berikut adalah tabel review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 dengan hasil analisis kebutuhan :

Tabel 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Tahun 2019

RANCANGAN AWAL RKPD						RANCANGAN AKHIR RKPD					
NO	**Program/Kegiatan**	**lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**NO**	**Program/Kegiatan**	**lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
A.	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**25,678,000,000.00**	**A.**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**26,031,508,000.00**
I	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**24,858,000,000.00**	**I**	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**24,858,000,000.00**
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan	12 Bulan	**1,175,000,000**	1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan	12 Bulan	**850,000,000**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Diskominfo	tersedianya jasa surat menyurat	3.500 Jml surat	50,000,000	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Disko minfo	tersedianya jasa surat menyurat	3.500 Jml surat	50,000,000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Diskominfo	tersedianya sumber daya komunikasi, air, dan listrik	12 bulan	250,000,000	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Disko minfo	tersedianya sumber daya komunikasi, air, dan listrik	12 bulan	250,000,000
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Diskominfo	terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	25,000,000	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Disko minfo	terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	25,000,000
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Diskominfo	terpenuhinya perizinan kendaraan dinas atau operasional	12 bulan	35,000,000	4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Disko minfo	terpenuhinya perizinan kendaraan dinas atau operasional	12 bulan	35,000,000
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Diskominfo	terpenuhinya jasa administrasi keuangan	12 BULAN	150,000,000	5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Disko minfo	terpenuhinya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	88,000,000

6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Diskominfo	terpenuhinya kebutuhan pelayanan kebersihan kantor	12 Bulan	50,000,000	6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Disko minfo	terpenuhinya kebutuhan pelayanan kebersihan kantor	12 Bulan	18,000,000
7	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Diskominfo	terpenuhinya kebutuhan perbaikan peralatan kerja	12 bulan	30,000,000						
8	Penyediaan alat tulis kantor	Diskominfo	tersedianya alat tulis kantor	1 tahun	20,000,000	7	Penyediaan alat tulis kantor	Disko minfo	tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	30,000,000
9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Diskominfo	tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	6 paket	35,000,000	8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Disko minfo	tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	45,000,000
10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Diskominfo	tersedianya komponen/ instalasi listrik	0 bulan	95,000,000	9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Disko minfo	tersedianya komponen/ instalasi listrik	12 bulan	30,000,000
11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Diskominfo	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	45,000,000						
12	Penyediaan peralatan rumah tangga	Diskominfo	tersedianya pealatan dan perlengkapan rumah tangga	1 tahun	45,000,000						
13	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Diskominfo	tersedianya bahan bacaan	12 bulan	50,000,000	10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Disko minfo	tersedianya bahan bacaan	12 bulan, 60 buku	25,000,000

14	Penyediaan bahan logistik kantor	Diskominfo	terssedianya bahan logistik kantor	1 tahun	35,000,000						
15	Penyediaan makanan dan minuman	Diskominfo	tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	50,000,000	11	Penyediaan makanan dan minuman	Disko minfo	tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	80,000,000
16	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Diskominfo	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	170,000,000	12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Disko minfo	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	300 kegiatan	174,100,000
17	Penyediaan Jasa Keamanan	Diskominfo	terpenuhinya jasa keamanan	12 bulan	40,000,000	13	Penyediaan Jasa Keamanan	Disko minfo	terpenuhinya jasa keamanan	12 bulan	4,900,000
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik setiap bulan	12 bulan	**1,062,000,000**	**2**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik setiap bulan	12 bulan	**620,249,000**
1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Diskominfo	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	1 paket	80,000,000	1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Disko minfo	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	5 unit kendaraan roda dua	100,000,000
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Diskominfo	tersedianya perelngkapan gedung kantor	1 jenis	40,000,000	2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Disko minfo	tersedianya perelngkapan gedung kantor	1 paket	20,000,000
3	Pengadaan peralatan gedung kantor	Diskominfo	tersedianya peralatan gedung kantor	1 paket	75,000,000						

4	Pengadaan mebeleur	Diskominfo	Tersedianya mebeler kantor	1 paket	52,000,000	3	Pengadaan mebeleur	Disko minfo	Tersedianya mebeler kantor	1 paket	40,000,000
5	Pengadaan komputer dan perlengkapanya	Diskominfo	Tersedianya komputer dan perlengkapannya	1 paket	40,000,000	4	Pengadaan komputer dan perlengkapanya	Disko minfo	Tersedianya komputer dan perlengkapannya	1 paket	25,000,000
6	Pengadaan alat-alat elektronik	Diskominfo	Tersedianya alat-alat elektronik	1 paket	100,000,000	5	Pengadaan alat- alat elektronik	Disko minfo	Tersedianya alat-alat elektronik	1 paket	40,000,000
7	Pengadaan lemari besi dan feling cabinet	Diskominfo	Tersedianya lemari besi dan filing kabinet	1 paket	25,000,000						
8	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Diskominfo	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan	130,000,000	6	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Disko minfo	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan	100,000,000
9	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Diskominfo	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	12 Bulan	120,000,000	7	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Disko minfo	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	12 Bulan	60,000,000
10	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Diskominfo	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 Tahun	60,000,000	8	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Disko minfo	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan	60,000,000
11	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Diskominfo	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	1 Tahun	60,000,000						
12	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Diskominfo	Terlaksananya pemeliharaan mebeler	1 Paket	15,000,000	9	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Disko minfo	Terlaksananya pemeliharaan mebeler	1 Paket	40,000,000
13	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapanya	Diskominfo	Terlaksananya pemeliharaan komputer dan perlengkapannya	12 Bulan	50,000,000	10	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapanya	Disko minfo	Terlaksananya pemeliharaan komputer dan perlengkapannya	12 Bulan	30,000,000

14	Pemeliharaan rutin/berkala alat- alat elektronik	Diskominfo	Terlaksananya pemeliharaan alat-alat elektronik	12 Bulan	40,000,000	11	Pemeliharaan rutin/berkala alat- alat elektronik	Disko minfo	Terlaksananya pemeliharaan alat-alat elektronik	12 Bulan	25,000,000
15	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Diskominfo	Terlaksananya rehab gedung kantor	1 Tahun	40,000,000	12	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Disko minfo	Terlaksananya rehab gedung kantor	12 Bulan	40,000,000
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor LPPL Swara Widuri	Diskominfo	Terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan gedung LPPL Swara Widuri	1 Tahun	85,000,000	13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor LPPL Swara Widuri	Disko minfo	Terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan gedung LPPL Swara Widuri	12 Bulan	35,249,000
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor LPPL Swara Widuri	Diskominfo	Terlaksananya pemeliharaan rutin LPPL Swara Widuri	1 Tahun	50,000,000						
3	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**presentase sdm aparatur yang memiliki kompetensi**	**60 presentase**	**242,545,000**	**3**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**presentase sdm aparatur yang memiliki kompetensi**	**60 presentase**	**242,545,000**
1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Diskominfo	jumlah sosialisasi perundang undangan	6 kegiatan	35,000,000	1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Disko minfo	jumlah sosialisasi perundang undangan	2 kegiatan	35,000,000
2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Diskominfo	jumlah aparatur yang memiliki kompetensi	50 orang	100,000,000	2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Disko minfo	jumlah aparatur yang memiliki kompetensi	12 kegiatan	100,000,000
3	Pengiriman pegawai pada seminar workshop terkait dengan pelaksanaan tupoksi	Diskominfo	jumlah aparatur yang mengikuti seminar/ workshop terkait pelaksanaan tupoksi	40 orang	107,545,000	3	Pengiriman pegawai pada seminar workshop terkait dengan pelaksanaan tupoksi	Disko minfo	jumlah aparatur yang mengikuti seminar/ workshop terkait pelaksanaan tupoksi	12 kegiatan	107,545,000

4	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**		prosentase dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia	14 laporan/dok	**50,225,000**	**4**	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**		prosentase dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia	14 laporan/dok	**50,225,000**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Diskominfo	jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja yang tersedia	5 laporan	12,325,000	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Disko minfo	jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja yang tersedia	1 dok	12,325,000
2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Diskominfo	jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun tepat waktu	1 dok	5,000,000	2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Disko minfo	jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun tepat waktu	1 dok	5,000,000
3	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Diskominfo	jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang terususun tepat waktu	1 dok/laporan	5,000,000	3	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Disko minfo	jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang terususun tepat waktu	1 dok/laporan	5,000,000
4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Diskominfo	jumlah laporan monitoring evaluasi dan pelaporan yang tersedia	4 dok	27,900,000	4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Disko minfo	jumlah laporan monitoring evaluasi dan pelaporan yang tersedia	12 bulan	27,900,000
5	**Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD**		Tersusunnya dokumen perencanaa dan penganggaran SKPD	14 dokumen	**192,470,000**	**5**	**Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD**		Tersusunnya dokumen perencanaa dan penganggaran SKPD	14 dokumen	**192,470,000**
1	Penyusunan data base perencanaan SKPD	Diskominfo	- jumlah database perencanaan yang tersusun - fasilitasi perda penataan dan pengendalian menara telekomunikasi	4 dok	149,920,000	1	Penyusunan data base perencanaan SKPD	Disko minfo	- jumlah database perencanaan yang tersusun - fasilitasi perda penataan dan pengendalian menara telekomunikasi	6 dok	149,920,000

2	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Diskominfo	jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	4 dok	42,550,000	2	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Disko minfo	jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	2 dok	42,550,000
6	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**		Tersedianya Data Center di Kab. Pemalang, Jumlah Penyiaran radio/Jumlah Pengawasan Isi Siaran radio, Cakupan layanan BTS	60%,11 stasiun, 80%	**15,835,000,000**	**6**	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**		Tersedianya Data Center di Kab. Pemalang, Jumlah Penyiaran radio/Jumlah Pengawasan Isi Siaran radio, Cakupan layanan BTS	60%,11 stasiun, 80%	**15,835,000**
1	Pengadaan alat sudio dan komunikasi	Diskominfo	tersedia nya peralatan studio untuk layanan multimedia, Jumlah Penyiaran Radio/Pengawasan Isi Siaran radio,Cakupan layanan BTS	0 -	90,000,000	1	Pengadaan alat sudio dan komunikasi	Disko minfo	tersedia nya peralatan studio untuk layanan multimedia	1 paket	90,000,000
2	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Diskominfo	tersedianya database SIM	1 dok	125,000,000	2	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Disko minfo	tersedianya database SIM	1 dok	125,000,000
3	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Diskominfo	tersedianya database renstra komunikasi publik	2 dokumen	130,000,000	3	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Disko minfo	tersedianya database renstra komunikasi publik	2 dokumen	130,000,000
4	Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi	Diskominfo	terpeliharanya peralatan studio dan komunikasi	12 bulan	65,000,000	4	Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi	Disko minfo	terpeliharanya peralatan studio dan komunikasi	12 bulan	65,000,000
5	Fasilitasi pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Diskominfo	tersedianya layanan pengadaan selama 1 tahun	1 tahun	350,000,000	5	Fasilitasi pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Disko minfo	tersedianya layanan pengadaan selama 1 tahun	12 bulan	350,000,000

6	Penyelenggaraan ekosistem Smart City	Diskominfo	tersedianya aplikasi dan infrastruktur untuk pemerintahan maupun publik guna mewujudkan smart city	14 titik hotspot	4,375,000,000	6	Penyelenggaraan ekosistem Smart City	Diskominfo	tersedianya aplikasi dan infrastruktur untuk pemerintahan maupun publik guna mewujudkan smart city	4 titik hotspot, 1 paket cctv, 1 paket FO, 6 bintek smart city	4,375,000,000
7	Pengembangan dan penyelenggaraan aplikasi berbagi pakai	Diskominfo	terkoneksinya aplikasi pemerintahan untuk mewujudkan aplikasi berbagai pakai serta pelatihan interoperabilitas dan interkoneksi	1 kegiatan	1,500,000,000	7	Pengembangan dan penyelenggaraan aplikasi berbagi pakai	Diskominfo	terkoneksinya aplikasi pemerintahan untuk mewujudkan aplikasi berbagai pakai serta pelatihan interoperabilitas dan interkoneksi	8 Aplikasi	1,500,000,000
8	Pengelolaan nama domain dan sub domain daerah	Diskominfo	Terwujudnya tatakelola subdomain pemerintahan daerah yang aman dan handal serta meningkatkan parisipasi masyarakat dalam menggunakan server didalam negeri dan domain id	20 website	1,200,000,000	8	Pengelolaan nama domain dan sub domain daerah	Diskominfo	Terwujudnya tatakelola subdomain pemerintahan daerah yang aman dan handal serta meningkatkan parisipasi masyarakat dalam menggunakan server didalam negeri dan domain id	20 website, 20 bintek website	1,200,000,000
9	Pengelolaan infrastruktur e-goverment, data dan informasi terintegrasi	Diskominfo	terintegrasinya data dan infrastruktur komunikasi, terpusatnya database	1 kegiatan	8,000,000,000	9	Pengelolaan infrastruktur e-goverment, data dan informasi terintegrasi	Diskominfo	Tersedianya Jaringan Bandwitch dan terpeliharanya peralatan dan mesin di ruang NOC	12 Bulan langganan bandwitch, 12 bulan pemeliharaan jaringan	8,000,000,000
7	**Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi**		prosentase ASN yang memilikik kompetensi dibidang IT	60 %	**708,000,000**	**7**	**Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi**		prosentase ASN yang memilikik kompetensi dibidang IT	60 %	**708,000,000**
1	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Diskominfo	terpenuhinya peningkatan SDM bidang kominfo	2 kegiatan	225,000,000	1	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Diskominfo	terpenuhinya peningkatan SDM bidang kominfo	4 kegiatan	225,000,000

2	Asistensi/bimbingan teknis bidang manajemen komunikasi publik	Diskominfo	jumlah aparatur yang mengikuti bintek	1 kegiatan	59,000,000	2	Asistensi/bimbingan teknis bidang manajemen komunikasi publik	Diskominfo	jumlah aparatur yang mengikuti bintek	1 kegiatan	59,000,000
3	Asistensi/bimbingan teknis bidang teknik jurnalistik	Diskominfo	fasilitasi peningkatan aparatur pemerintah daerah dalam bidang jurnalistik	1 kegiatan	50,000,000	3	Asistensi/bimbingan teknis bidang teknik jurnalistik	Diskominfo	fasilitasi peningkatan aparatur pemerintah daerah dalam bidang jurnalistik	1 kegiatan	50,000,000
4	Asistensi/bimbingan teknis bidang analisis data	Diskominfo	jumlah aparatur pemerintah yang mengikuti bintek	1 kegiatan	90,000,000	4	Asistensi/bimbingan teknis bidang analisis data	Diskominfo	jumlah aparatur pemerintah yang mengikuti bintek	2 kegiatan	90,000,000
5	Asistensi/bimbingan teknis bidang komunikasi organisasi	Diskominfo	jumlah aparatur pemerintah yang mengikuti bintek	1 kegiatan	85,000,000	5	Asistensi/bimbingan teknis bidang komunikasi organisasi	Diskominfo	jumlah aparatur pemerintah yang mengikuti bintek	1 kegiatan	85,000,000
6	Sosialisasi kehumasan bagi aparatur pemerintah kabupaten pemalang	Diskominfo	jumlah aparatur pemerintah daerah yang mengikuti sosialisasi kehumasan	2 kegiatan	199,000,000	6	Sosialisasi kehumasan bagi aparatur pemerintah kabupaten pemalang	Diskominfo	jumlah aparatur pemerintah daerah yang mengikuti sosialisasi kehumasan	3 kegiatan	199,000,000
8	**Program kerjasama informasi dengan mas media**		prosentase informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipublikasi kan melalui media massa	60 %	**830,000,000**	**8**	**Program kerjasama informasi dengan mas media**		prosentase informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipublikasi kan melalui media massa	60 %	**930,000,000**
1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Diskominfo	jumlah penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media	5 paket	400,000,000	1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Diskominfo	jumlah penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media	4 media gathering, 15 konferensi pers, 1 presstour, 2 penayangan potensi daerah	500,000,000

2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Diskominfo	jumlah tersebarnya informasi pemerintahan daerah melalui penerbitan majalah, tabloid, koran dan terlaksananya pelayanan multimedia	0 kegiatan	370,000,000	2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Disko minfo	jumlah tersebarnya informasi pemerintahan daerah melalui penerbitan majalah, tabloid, koran dan terlaksananya pelayanan multimedia	5 edisi majalah,2 edisi tabloid	370,000,000
3	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Diskominfo	terlaksananya desiminasi informasi	12 kali	60,000,000	3	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Disko minfo	terlaksananya desiminasi informasi	12 kali pemutaran film, 1 lomba FK Metra tingkat kecamatan	60,000,000
9	**Program penguatan kelembagaan dalam pengelolaan komunikasi dan infromasi daerah**		persentase pemerdayaan KIM	80 %	**1,298,000,000**	**9**	**Program penguatan kelembagaan dalam pengelolaan komunikasi dan infromasi daerah**		persentase pemerdayaan KIM	80 %	**681,600,000**
1	Koordinasi bidang komunikasi dan informasi lintas SKPD, lintas instansi vertikal, BUMDA dan swasta lokal	Diskominfo	pembentukan dan rakor bakohumas	6 kegiatan	150,000,000	1	Koordinasi bidang komunikasi dan informasi lintas SKPD, lintas instansi vertikal, BUMDA dan swasta lokal	Disko minfo	pembentukan dan rakor bakohumas	6 kegiatan	150,000,000
2	Revitalisasi pendayagunaan media center daerah	Diskominfo	terpeliharanya pelayanan informasi dan komunikasi publik melalui media center daerah	0 kegiatan	99,000,000	2	Revitalisasi pendayagunaan media center daerah	Disko minfo	terpeliharanya pelayanan informasi dan komunikasi publik melalui media center daerah	360 upload berita	99,000,000
3	Penguatan komunikasi publik melalui website dan SMS center	Diskominfo	fasilitasi media center dan penguatan komunikasi publik dalam rangka pelayanan aduan masyarakat melalui website dan sms center	0 kegiatan	200,000,000	3	Penguatan komunikasi publik melalui website dan SMS center	Disko minfo	fasilitasi media center dan penguatan komunikasi publik dalam rangka pelayanan aduan masyarakat melalui website dan sms center	12 layanan aduan masyarakat	232,600,000

4	Penguatan kelembagaan pengelolaan informasi publik	Diskominfo	terlaksana nya fasilitas KIM dan forum TI	4 kegiatan	49,000,000	4	Penguatan kelembagaan pengelolaan informasi publik	Disko minfo	terlaksana nya fasilitas KIM dan forum TI	4 rakor KIM	200,000,000
5	Penyelenggaraan Goverment CIO	Diskominfo	tersedianya kebijakan regulasi dan tata kelola sistem transaksi elektronik	0 kegiatan	500,000,000						
6	Pemberdayaan dan pemanfaatan e-goverment	Diskominfo	meningkatkan budaya pemanfaatan TIK secara cerdas kreatif dan produktif (CAKAP) untuk mengutkan karakter budaya bangsa, tersedia nya fasilitasi informasi pembangunan	0 kegiatan	300,000,000						
10	**Program peningkatan tata laksana komunikasi dan informatika**		presentase SKPD yang telah memiliki website	100 PERSEN	**2,800,000,000**	**10**	**Program peningkatan tata laksana komunikasi dan informatika**		presentase SKPD yang telah memiliki website	100 PERSEN	**4,748,419,500**
1	Penyediaan dan pendayagunaan teknologi informatika dan komunikasi	Diskominfo	jumlah informasi strategis dan aktual nasional melalui media masa, media baru, media tradisional, media interpersonal dan media luar ruang yang diproduksi dan didesiminasikan	0 kegiatan	400,000,000	1	Penyediaan dan pendayagunaan teknologi informatika dan komunikasi		jumlah informasi strategis dan aktual nasional melalui media masa, media baru, media tradisional, media interpersonal dan media luar ruang yang diproduksi dan didesiminasikan	4 kali rakor dan 4 kali pelatihan	400,000,000
2	Pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet, baleho dll		jumlah pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster,leaflet dan baleho	0 kegiatan	299,700,000	2	Pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet, baleho dll		jumlah pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster,leaflet dan baleho	5.000 poster, 10.000 leafleat, 50 baliho, 20 spanduk, 2.000 kalender, 1.000 booklet	500,000,000

3	Monitoring informasi peristiwa dan pemberitaan aktual lintas daerah		dokumen analisis isu pemberitaan daerah	2 dokumen	120,000,000	3	Monitoring informasi peristiwa dan pemberitaan aktual lintas daerah		dokumen analisis isu pemberitaan daerah	2 dokumen	120,000,000
4	Dokumentasi dan publikasi program/ kegiatan SKPD		terdokumentasi nya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 kegiatan	262,600,200	4	Dokumentasi dan publikasi program/ kegiatan SKPD		terdokumentasi nya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah	360 kegiatan, 100 buku kliping berita, 100 buku himpunan sambutan Bupati, 4 video profil, 4 video dokumenter	500,000,000
5	Pemberian informasi publik melalui iklan layanan masyarakat (adventorial)		Tersedianya pemberian informasi publik melalui iklan layanan masyarakat	12 Bulan	500,195,300	5	Pemberian informasi publik melalui iklan layanan masyarakat (adventorial)		Tersedianya pemberian informasi publik melalui iklan layanan masyarakat	12 rubrik Bupati menjawab, 10 iklan display/kolom, 25 advetorial cetak, 1 ILPPD, 10 advetorial TV	1,500,000,000
6	Komunikasi publik melalui dialog interaktiv, radio dan televisi		terfasilitasinnya komunikasi publik melalui dialog interaktiv radio dan televisi	24 dialog ingteraktiv	239,085,000	6	Komunikasi publik melalui dialog interaktiv, radio dan televisi		terfasilitasinnya komunikasi publik melalui dialog interaktiv radio dan televise	4 dialog TV, 4 dialog sarahsehan Bupati	750,000,000
7	Pelayanan informasi melalui media online		terpenuhinya pengelolaan dan pengembangan asset	0 tahun							

8	Pengelolaan dan inventarisasi data dan penyajian informasi kebijakan pemerintah daerah		penyusunan data informasi publik, rakor PPID dan PPID pembantu dan sangketa informasi penyediaan informasi publik	4 rakor	494,177,500	7	Pengelolaan dan inventarisasi data dan penyajian informasi kebijakan pemerintah daerah		penyusunan data informasi publik, rakor PPID dan PPID pembantu dan sangketa informasi penyediaan informasi public	4 rakor PPID, 2 kegiatan fasilitasi sengketa informasi	494,177,500
9	Pengelolaan program radio dan televisi daerah untuk masyarakat		terlaksananya program radio dan televisi daerah untuk masyarakat	120 siaran puasa	484,242,000	8	Pengelolaan program radio dan televisi daerah untuk masyarakat		terlaksananya program radio dan televisi daerah untuk masyarakat	120 siaran puasa, 12 kali siaran lebaran, 28 kali siaran arus mudik/balik, 30 siaran langsung, 360 berita radio, 300 spot ILM, 1 fasilitasi penyelenggaraan penyiaran LPPL Radio Swara Widuri	484,242,000
II	**Statistik**				**1,150,000,000.00**	**II**					**630,000,000.00**
1	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**		persentase ketersediaan dokumen statistik daerah	40 %	**1,150,000,000.00**	**1**	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**		persentase ketersediaan dokumen statistik daerah	40 %	**650,000,000.00**
1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah		Berkembangnya data/informasi/statistik daerah	12 bulan	750,000,000	1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah		Berkembangnya data/informasi/statistik daerah	8 dokumen statistik daerah, 4 rakor petugas data, 1 buku metadata	450,000,000
2	Pengelolaan Data Statistik Daerah			12 Bulan	200,000,000						

3	Pengelolaan Data Statistik Daerah		Jumlah dok kab pemalang dalam angka,jumlah dok kec dalam angka,jumlah dok PDRB kec,jumlah dok indeks harga konsumen dan laju inflasi kab pemalang,jumlah dokindikator penting pembangunan kab pemalang	12 Bulan	200,000,000	2	Pengelolaan Data Statistik Daerah		Jumlah dok kab pemalang dalam angka,jumlah dok kec dalam angka,jumlah dok PDRB kec,jumlah dok indeks harga konsumen dan laju inflasi kab pemalang,jumlah dok indikator penting pembangunan kab pemalang	2 rakor statistik, 6 narasi statistik, 1 publikasi data statistik, 4 sosialisasi statistik Tk Kec	200,000,000
III	**Persandian**				**820,000,000.00**	**III**	**Persandian**				**793,000,000.00**
1	**Program pengembangan data/informasi persandian**		presentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD	70 persen	**820,000,000.00**	**1**	**Program pengembangan data/informasi persandian**		presentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD	70 persen	**793,000,000.00**
1	Pengamanan komunikasi dan informasi		terwujudnya penyelenggaraan keamanan informasi	12 bulan	270,000,000	1	Pengamanan komunikasi dan informasi		terwujudnya penyelenggaraan keamanan informasi	12 fasilitasi konsultasi keamanan informasi, 1 sosialisasi keamanan informasi, 1 studi invetarisasi implementasi SMPI, 1 paket layanan sertifikasi SSL, 2 kunci digital	250,000,000
2	Penyelenggaraan kemananan informasi		terselenggaranya pelayanan publik yang aman handal, percaya dan bertanggungjawab	12 bulan	550,000,000	2	Penyelenggaraan kemananan informasi		terselenggaranya pelayanan publik yang aman handal, percaya dan bertanggungjawab	12 bulan, 1 paket web aplication firewall	543,000,000

Berdasarkan hasil review pada tabel 3 tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah kegiatan yang telah tercantum pada Rancangan Awal RKPD adalah sebanyak 80 kegiatan. Berdasarkan evaluasi, masukan dan saran melalui musrenbang jumlah kegiatan pada rancangan akhir RKPD berkurang menjadi 61 kegiatan. Adapun pengurangan kegiatan untuk efektititas pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target program. Semua kegiatan telah mendapatkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan.
2. Dalam hal perencanaan anggaran, masih dapat memenuhi sesuai dengan kebutuhan.
3. Prioritas pendanaan lebih diberikan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat fasilitasi ketersediaan infrastruktur komunikasi dan informatika, dan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung tercapainya target IKK dan SPM.
4. Berdasarkan usulan masyarakat melalui forum Musrenbang, ditambahkan fasilitasi kegiatan pelatihan komputer untuk warga masyarakat dengan lokasi menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

1. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informasi

a. Permasalahan

Permasalahan yang menjadi pencermatan pada kementerian komunikasi dan informasi adalah :

1) Lisensi yang bergeser dari lisensi yang berbeda untuk penyelenggaraan telekomunikasi, internet, penyiaran menjadi satu macam lisensi gabungan yang dapat dipergunakan untuk bermacam-macam penyelenggaraan;
2) Pemisahan secara vertikal per sektor bergeser menjadi pemisahan secara horisontal antara infrastruktur, layanan, aplikasi dan konten. Demikian juga tentang perlunya pemisahan antara sumber daya dan penyelenggaraan;
3) Ekslusivitas sumber daya dan infrastruktur menjadi pemakaian bersama sumber daya dan infrastruktur;
4) Tarif layanan yang berbasis jarak dan waktu menjadi berbasis volume konten dan kualitas;
5) Arah komunikasi dari satu menjadi banyak arah (jaringan) dan semua elemen masyarakat turut berpartisipasi sebagai penyedia dan pengguna informasi;
6) Konten yang bebas tanpa campur tangan pemerintah menjadi yang aman dan bertanggung jawab melalui pemberdayaan masyarakat dalam pengawasannya;
7) Pasar yang bergeser dari bebas menjadi terlindungi untuk memberi kesempatan pada pemain domestic;
8) Hak warganegara atas informasi yang telah dijamin dalam UUD 1945 serta hak atas informasi publik yang telah dijamin dalam UU Keterbukaan Informasi Publik;
9) Pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat belum optimal, karena media massa lebih dominan menyajikan

konten hiburan, sementara jalur birokrasi untuk penyampaian informasi belum terkoordinasi dengan baik, baik antar lembaga pemerintah pusat maupun antar pemerintah daerah (hubungan pusat dan daerah) dalam informasi;

10) Kecenderungan positif terjadi yaitu berkembangnya citizen journalism, dimana anggota masyarakat berperan melaporkan peristiwa yang terjadi disekitarnya;

11) Dominasi kepentingan bisnis mempengaruhi media massa dan aktifitas komunikasi lainnya, sehingga menjadikan informasi sebagai komoditas material yang akan mendangkalkan rasionalitas, kepekaan, harmonisasi, keserasian yang akhirnya tidak mendukung masyarakat yang aman, damai, sejahtera dan bersatu.

b. Visi dan Kementerian Komunikasi dan Informasi

Visi Kementerian Komunikasi dan Informasi 2015-2019 adalah **"Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"**.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui 7 misi pembangunan nasional yaitu:

1. mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. mewujudkan masyarakat maju berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera
5. mewujudkan bangsa yang berdaya saing;dan
6. mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; serta

mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

2. Pemerintah Kabupaten Pemalang

a. Visi

Visi Kabupaten Pemalang untuk lima tahun ke depan adalah :

" Terwujudnya Pemalang Hebat yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan Sejahtera. "

Penjelasan Visi :

Dalam visi tersebut di atas terdapat empat gagasan pokok yang menjiwai seluruh gerak dan proses pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pemalang, yaitu :

a. **Pemalang Hebat**, Terwujudnya Pemalang Hebat merupakan suatu kondisi dimana harapan, keinginan, cita-cita yang diharapkan menjadi ada. Pemalang Hebat merupakan *ultimate goal* yang dicita-citakan dan yang dibangun dari kondisi Pemalang yang berdaulat, berjatidiri, mandiri dan sejahtera. **Pemalang Hebat** juga menjadi *tagline* pembangunan daerah dalam memacu semangat, percepatan dan sinergitas para *stakeholders* terkait dalam mengupayakan perwujudan pembangunan Pemalang.

b. **Berdaulat** diartikan sebagai kemampuan pemerintah dan masyarakat Pemalang yang mampu membangun, mengatur dan mengurus kepentingan daerah/ rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat dan gotong royong, dengan tetap memperhatikan sinergitas pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang baik serta penegakan supremasi hukum.

c. **Berjatidiri** diartikan sebagai pembangunan Pemalang yang memiliki keunggulan yang berbasis *local wisdom/local value* dengan menumbuhkan kembali seni dan kebudayaan asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat yang agamis, toleran, harmonis dan saling menghormati.

d. **Mandiri** diartikan sebagai pembangunan Pemalang yang mengandalkan dan mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang dimiliki, meningkatkan sarana prasarana infrastruktur dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan, pengembangan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal.

e. **Sejahtera** diartikan sebagai kondisi masyarakat Pemalang yang berkualitas, peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat yang didukung daya saing masyarakat dan keberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2. Misi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian visi dan misi Bupati Pemalang. Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung keseluruhan Misi Kabupaten Pemalang.

Pencapaian Visi "Terwujudnya Pemalang Hebat yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan Sejahtera", ditempuh melalui 7 (tujuh) misi sebagai berikut :

a. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah, mufakat dan gotong royong
b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak
c. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumber daya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran
d. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar yang merata serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan daya saing daerah

e. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis dan saling menghormati
f. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum kemudahan investasi dan daya saing daerah
g. Menumbuhkan kembali Budaya Asli Daerah Kabupaten Pemalang sebagai landasan pembentukan jati diri Pemalang untuk memperkokoh kepribadian bangsa

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian visi dan misi Bupati Pemalang. Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung pencapaian visi dan keseluruhan Misi Kabupaten Pemalang.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dituntut untuk mampu mengejawantahkan Visi Pembangunan Pemalang 2016-2021, melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika sejalan dengan **misi 1 (pertama)** Kabupaten Pemalang yakni *"Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong", dan* ***misi*** **yang ke 6** (Enam) yaitu *Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik, penegakan supermasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah* .

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PD

Berdasarkan tugas dan fungsi yang diemban Dinas Komunikasi dan Informatika dengan segala isu-isu serta permasalahannya yang telah dipaparkan dalam BAB II, maka Renja Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tujuan dan sasaran agar visi dan misi yang telah ditetapkan dalam jangka waktu lima tahun dapat tercapai.

1. Tujuan dan Sasaran

Rumusan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang yang diampu Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

Tabel.3.1

Tujuan dan sasaran Program Prioritas Daerah

Urusan Komunikasi dan Informatika, Satistik dan Persandian

Tujuan	Sasaran	Indikasi sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2015)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya kualitas jaringan telekomunikasi dan Informatika guna menunjang pelayanan publik	Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	Cakupan pelayanan TI bagi masyarakat	Titik Hot spot	Na	3	6	9	12	14	14

Tabel 3.2

Tujuan, sasaran dan Indikator beserta program Tahun 2019

Tujuan	**Sasaran**	**Indikator Kinerja sasaran**	**Satuan**	**Target Tahun 2019**	**Nama Program**	**Indikator program**	**Target Kinerja program Tahun 2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai LKJIP	Nilai	C	1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program peningkatan Kualitas Aparatur 4. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 5. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.Tersedianya pelayanan adminsitrasi perkantoran 2.Tersedianya sarana dan prasarana aparatur 3.Meningkatnya kualitas aparatur 4.Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran SKPD 5.Meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan	80% 80% 80% 80% 80%
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya layanan informasi dan aspirasi	- Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang	Persen	80%	Program Penguatan Kelembagaan dalam Komunikasi dan Informasi Daerah	Cakupan pengembangan dan Pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di Kabupaten	14 kelompok

yang baik sebagai wujud pelayanan publik yang prima dan perbaikan citra publik	publik.	ditindaklanjuti tepat waktu - Tingkat pemenuhan informasi publik pada website Pemalangkab.go.id - Pemeringkatan keterbukaan Infomasi Publik	Persen Peringkat	80% 14	Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika	Pemalang Prosentase Website OPD yang aktif update data Prosentase OPD yang memiliki Website Meningkatnya kualitas informasi melalui media cetak dan elektronik	 80% 100% 80%
	Memperkuat kualitas Aparat Komunikasi Informatika.	- Prosentase Aparatur Sipil yang trampil di bidang komunikasi dan informatika	Persen	80%	Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika	Prosentase SKPD yang telah memiliki website Prosentase ASN yang trampil di bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika	72 80%
	Membangun Citra Positif Pemerintah Kabupaten Pemalang di Mata Publik	- Rasio berita positif dan negatif di media mainstream tentang Pemerintah Kabupaten Pemalang	Persen	80:20	Program kerjasama informasi dengan media massa	- Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa seperti majalah , radio dan televisi - Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui baru (on line) - Jumlah pelaksanaan	4 kali 4 kali 1 kali

						Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media tradisional - Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media interpersonal - Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media luar ruang	3 kali
					Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika	Prosentase OPD yang memiliki Website Meningkatnya kualitas informasi melalui media cetak dan elektronik	100% 80%
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik	- Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi literasi media	Kelompok	14	Program Penguatan Kelembagaan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi daerah	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di Kabupaten Pemalang	14 kelompok

Meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi dan informatika guna menunjang pelayanan publik	Terwujudnya pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.	- Tersedianya Data Center dan NOC dengan berstandar - Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks PEGI) - Pemenuhan Standar Manajemen Pengamanan Informasi	Persen Nilai persen	80 3 60%	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Pengembangan Persandian/Informasi Daerah	- Tersedianya Data Center - Cakupan Layanan BTS - Jumlah stasiun radio Prosentase informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait	60% 95% 12 100%
	Terintegrasinya data (interoperabilitas sistem informasi) antar seluruh SKPD/OPD	- Prosentase data statistic antar SKPD/ OPD yang terintegrasi	Persen	60	Program Pengembangan Data/Statistik/Informasi daerah	- Jumlah dokumen Kabupaten dalam angka - Jumlah dok - umen kecamatan dalam angka - Jumlah dokumen PDRB kecamatan - Jumlah dokumen	100% 100% 100% 00%

						Indeks Harga konsumen dan Laju Inflasi Kabupaten pemalang - Jumlah dokumen NTP Kabupaten pemalang - Jumlah dokumen indikator penting pembangunan daerah kabupaten pemalang	 100% 100%

2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara itu kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan, strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD Kabupaten Pemalang yang menjadi tugas dan fungsi Strategi dan Arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang 5 (lima) tahun kedepan mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Berdasarkan analisis dari pembobotan dengan menggunakan metode profesional judgement, maka terdapat 5 (lima) strategi pilihan yakni sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas aparatur perencana mengenai perencanaan dan penganggaran serta pelaporan kinerja pembangunan daerah.
2. Menerapkan tata kelola E Goverment dan Pelayanan Informasi Publik.
3. Mengintegrasikan data TIK dan data pelayanan publik.
4. Membangun infrastruktur jaringan TIK dan komunikasi publik.
5. Pemberdayaan Masyarakat di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang mendasarkan pada tujuan RPJMD adalah sebagai berikut:

Tujuan 1:

Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangungan daerah, serta pelaporan kinerja pemerintah daerah

Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah

Strategi:

Meningkatkan kualitas rencana pembangunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas aparatur perencana mengenai perencanaan dan penganggaran serta pelaporan kinerja pembangunan daerah.

Kebijakan:

- Penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, serta penyusunan berbagai laporan kinerja sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan

Tujuan 2 :

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai wujud pelayanan publik yang prima dan perbaikan citra publik

Sasaran 1: Meningkatnya layanan informasi dan aspirasi publik.

Strategi:

- Pemanfatan TIK dalam kegiatan pelayanan publik secara transparan, cepat dan handal.

Kebijakan:

- Restrukturasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pembantu di setiap OPD.
- Meningkatkan peran PPID dalam menghimpun dan mengelola data
- Menyusun SOP Standar Layanan Informasi Publik.
- Membekali sarana dan prasarana teknologi informasi bagi PPID untuk kebutuhan layanan informasi publik
- Menyediakan sarana informasi publik.
- Meningkatkan kualitas dan kapasitan layanan infpormasi publik.
- Menyediakan konten layanan informasi publik.
- Membuka layanan partisipasi, aspirasi, dan pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan
- Pengembangan layanan informasi.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas Aparatur di bidang Komunikasi Informatika

Strategi:

Meningkatkan kemampuan SDM dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi.

Kebijakan:

- Meningkatkan keahlian dan keterampilan Aparatur Sipil Negara di setiap SKPD/OPD di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan pelayanan prima
-

Sasaran 3: Membangun Citra Positif Pemerintah Kabupaten Pemalang di Mata Publik

Strategi : Optimalisasi dan intensifikasi pemanfaatan media informasi untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Kebijakan:

- Meningkatkan peran PPID sebagai juru bicara lembaga
- Meningkatkan kerjasama informasi dengan media massa
- Meningkatkan kualitas media milik pemerintah daerah
- Penguatan literasi media untuk meningkatan kesadaran, kemampuan, dan kapasitas masyarakat dalam memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya

Sasaran 4 : Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi

Strategi:

Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi untuk diseminasi program pembangunan, dan meningkatkan pelayanan publik

Kebijakan:

- Menyediakan data yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat
- Pemberdayaan masyarakat di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tujuan 2 :

Meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi dan informatika guna menunjang pelayanan publik

Sasaran 1 : Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Strategi: Mengembangkan sarana dan prasarana TIK untuk mewujudkan data terpadu.

Kebijakan:

- Membangun data center dan NOC berstandar.
- Pengembangan jaringan FO
- Menyusun standarisasi perangkat lunak dan perangkat keras

- Menyusun standar basis data
- Menyusun mekanisme interoperabilitas antar data.
- Menyediakan server basis data dan aplikasi
- Menyediakan aplikasi baik yang berbasis web maupun yang berbasis mobile
- Melakukan tuning (optimalisasi) aplikasi dan basis data untuk mempercepat aksesibilitas.

Sasaran 2: Terintegrasinya data antar SKPD/OPD

Strategi: Mengoptimalkan kualitas data dan informasi melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kebijakan:

- Pemanfaatan inovasi teknologi informasi dan komunikasi dan penguatan statistic sectoral
- Menyediakan data yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat

3.3 Program dan Kegiatan SKPD

Program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Tahun 2016 - 2021 yang bereferensi pada RPJM Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 - 2021. Program dan kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai arah kinerja SKPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas serta terjaminnya kesinambungan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Pemalang dan OPD yang menjadi bidang tugas.

Disamping kedudukan yang demikian, program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 diharapkan dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat serta tolok ukur pencapaian arah kebijakan, visi dan misi Bupati Pemalang yang tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021, Indikator SDGs, NSPK dan pencapaian indicator SPM.

Dari prioritas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menetapkan sasaran seperti tersebut di atas. Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis tersebut, diperlukan dukungan oleh segenap komponen organisasi yang terintegrasi dalam rencana program dan kegiatan terpadu.

Rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang pada Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan:

a. Penyediaan jasa surat menyurat
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas
d. Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor
e. Penyediaan jasa administrasi keuangan
f. Penyediaan jasa kebersihan kantor
g. Perbaikan peralatan kerja
h. Penyediaan alat tulis kantor
i. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
j. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

k. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
l. Penyediaan bahan logistik kantor
m. Penyediaan peralatan rumah tangga
n. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
o. Penyediaan makanan dan minuman
p. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
q. Penyediaan jasa keamanan

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan:

a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
b. Pengadaan peralatan gedung kantor
c. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
d. Pengadaan komputer dan perlengkapannya
e. Pengadaan alat-alat elektronik
f. Pengadaan mebeleur
g. Pengadaan peralatan gedung kantor
h. Pengadaan lemari besi dan feeling kabinet
i. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
j. Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional
k. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
l. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
m. Rehab sedang/berat gedung kantor
n. Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya
o. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat elektronik
p. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor LPPL Swara Widuri
q. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor LPPL Swara Widuri
r. Pemeliharaan peralatan studio LPPL Swara Widuri

3.Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

kegiatan:

a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
b. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

c. Pengiriman pegawai pada seminar workshop terkait dengan pelaksanaan tupoksi

4. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan:

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

5. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

a. Penyusunan data base perencanaan SKPD
b. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD

6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

kegiatan :

a. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi;
b. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi;
c. Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi;
d. Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi
e. Pengkajian dan Pengembangan sistem Komunikasi dan Informasi;
f. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi;
g. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
h. Fasilitasi Pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik
k. Penyelenggaraan ekosistem smart city
l. Pengembangan dan penyelenggaraan aplikasi berbagai pakai
m. Pengelolaan nama domain dan sub domain daerah

n. Pengelolaan infrastruktur e-government, data dan informasi terintegrasi

7. Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi

kegiatan :

a. Asistensi/bimbingan Teknis bidang manajemen komunikasi publik
b. Asistensi/bimbingan Teknis bidang Teknis Jurnalistik
c. Asistensi/bimbingan Teknis bidang analisis data
d. Asistensi/bimbingan teknis bidang komunikasi organisasi
e. Sosialisasi Kehumasan bagi aparatur Pemerintah Kabupaten Pemalang

8. Program Kerja Sama Informasi dengan Mass Media

kegiatan :

a. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah;
b. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
c. Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat.

9. Program Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah

kegiatan :

a. Koordinasi bidang komunikasi dan informasi lintas SKPD, lintas instansi vertikal, BUMDA, dan swasta
b. Revitalisasi pendayagunaan media center daerah
c. Penyusunan Standar Operasional Prosedur komunikasi dan informasi daerah
d. Penyusunan Manual Prosedur penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat
e. Penguatan Komunikasi Publik melalui website dan media center
f. Penguatan kelembagaan pengelolaan informasi publik

10. Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika,

kegiatan :

a. Pelayanan Informasi melalui Media Online;
b. Pengelolaan dan Inventarisasi Data dan Penyajian Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah.
c. Penyusunan Standar dokumentasi dan publikasi isu-isu strategis
d. Penyediaan dan pendayagunaan teknologi informatika dan komunikasi
e. Pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet,baleho dll
f. Monitoring informasi, peristiwa dan pemberitaan daerah
g. Dokumentasi/publikasi program/kegiatan SKPD
h. Pemberian informasi publik melalui iklan layanan masyarakat (advertorial)
i. Komunikasi Publik melalui melalui dialog interaktif, radio dan televisi
j. Pelayanan informasi melalui media on line
k. Pengelolaan dan inventarisasi data dan penyajian informasi kebijakan pemerintah daerah
l. Pengelolaan program radio dan televisi daerah untuk masyarakat

11. Program Pengembangan Data/Statistik daerah

a. Penyusunan dan pengumpulan data Statistik Daerah
b. Pengelolaan data statistik daerah

12. Program Pengembangan Persandian/informasi daerah

a. Pengamanan komunikasi dan informasi
b. Penyelenggaraan keamanan informasi

Tabel 3.3

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019

Kabupaten Pemalang

SKPD: Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	OPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										**26,301,508,500**	**22,480,239,000**	**DISKOMINFO**
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**										**26,301,508,500**	**22,480,239,000**	**DISKOMINFO**
2.10	**Komunikasi dan Informatika**										**24,858,508,500**	**21,010,239,000**	**DISKOMINFO**
1.2.1.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.**	**meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi**	**DISKOMINFO**	**terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan**	**12 Bulan**					**850,000,000**	**850,000,000**	**DISKOMINFO**
1.2.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			tersedianya jasa surat menyurat	3.500 Jml surat	tersedianya jasa surat menyurat	3.500 Jml surat	50,000,000	50,000,000	DISKOMINFO
1.2.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			tersedianya sumber daya komunikasi, air, dan listrik	12 bulan	tersedianya sumber daya komunikasi, air, dan listrik	12 bulan	250,000,000	250,000,000	DISKOMINFO

1.2.1.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	25,000,000	25,000,000	DISKOMINFO
1.2.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			terpenuhinya perizinan kendaraan dinas atau operasional	12 bulan	terpenuhinya perizinan kendaraan dinas atau operasional	12 bulan	30,000,000	30,000,000	DISKOMINFO
1.2.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			terpenuhinya jasa administrasi keuangan	12 BULAN	terpenuhinya jasa administrasi keuangan	12 BULAN	88,000,000	88,000,000	DISKOMINFO
1.2.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			terpenuhinya kebutuhan pelayanan kebersihan kantor	12 Bulan	terpenuhinya kebutuhan pelayanan kebersihan kantor	12 Bulan	18,000,000	18,000,000	DISKOMINFO
1.2.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	30,000,000	30,000,000	DISKOMINFO
1.2.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	45,000,000	45,000,000	DISKOMINFO

1.2.1.112	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			tersedianya komponen/ instalasi listrik	12 bulan	tersedianya komponen/ instalasi listrik	12 bulan	30,000,000	30,000,000	DISKOMINFO
1.2.1.115	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			tersedianya bahan bacaan	12 Bulan, 60 Buku	tersedianya bahan bacaan	12 bulan, 60 Buku	25,000,000	25,000,000	DISKOMINFO
1.2.1.117	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	80,000,000	80,000,000	DISKOMINFO
1.2.1.118	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	300 Kegiatan	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	300 kegiatan	174,100,000	174,100,000	DISKOMINFO
1.2.1.119	Penyediaan Jasa Keamanan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			terpenuhinya jasa keamanan	12 bulan	terpenuhinya jasa keamanan	12 bulan	4,900,000	4,900,000	DISKOMINFO
1.2.1.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.**	**meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi**	**DISKOMINFO**	**terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik setiap bulan**	**12 bulan**					**620,249,000**	**620,249,000**	**DISKOMINFO**

1.2.1.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			Tersedianya kendaraan dinas/operasional	5 unit kendaraan roda dua	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	5 unit kendaraan roda dua	100,000,000	100,000,000	DISKOMINFO
1.2.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			tersedianya perelngkapan gedung kantor	1paket	tersedianya perelngkapan gedung kantor	1 paket	25,000,000	25,000,000	DISKOMINFO
1.2.1.2.10	Pengadaan mebeleur	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			Tersedianya mebeler kantor	1 paket	Tersedianya mebeler kantor	1 paket	40,000,000	40,000,000	DISKOMINFO
1.2.1.2.11	Pengadaan komputer dan perlengkapanya	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			Tersedianya komputer dan perlengkapannya	1 paket	Tersedianya komputer dan perlengkapannya	1 paket	25,000,000	25,000,000	DISKOMINFO
1.2.1.2.12	Pengadaan alat- alat elektronik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			Tersedianya alat-alat elektronik	1 paket	Tersedianya alat-alat elektronik	1 paket	40,000,000	40,000,000	DISKOMINFO
1.2.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan	100,000,000	100,000,000	DISKOMINFO

1.2.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	12 Bulan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	12 Bulan	60,000,000	60,000,000	DISKOMINFO
1.2.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan	60,000,000	60,000,000	DISKOMINFO
1.2.1.2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			Terlaksananya pemeliharaan mebeler	1 Paket	Terlaksananya pemeliharaan mebeler	1 Paket	40,000,000	40,000,000	DISKOMINFO
1.2.1.2.30	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapanya	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			Terlaksananya pemeliharaan komputer dan perlengkapannya	12 Bulan	Terlaksananya pemeliharaan komputer dan perlengkapannya	12 Bulan	30,000,000	30,000,000	DISKOMINFO
1.2.1.2.31	Pemeliharaan rutin/berkala alat- alat elektronik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			Terlaksananya pemeliharaan alat-alat elektronik	12 Bulan	Terlaksananya pemeliharaan alat-alat elektronik	12 Bulan	25,000,000	25,000,000	DISKOMINFO
1.2.1.2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			Terlaksananya rehab gedung kantor	12 Bulan	Terlaksananya rehab gedung kantor	12 Bulan	40,000,000	40,000,000	DISKOMINFO

1.2.1.2.46	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor LPPL Swara Widuri	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			Terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan gedung LPPL Swara Widuri	12 Bulan	Terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan gedung LPPL Swara Widuri	12 Bulan	35,249,000	35,249,000	DISKOMINFO
1.2.1.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.**	**meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi**	**DISKOMINFO**	**presentase sdm aparatur yang memiliki kompetensi**	**60 presentase**					**242,545,000**	**242,545,000**	**DISKOMINFO**
1.2.1.5.2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			jumlah sosialisasi perundang undangan	2 kegiatan	jumlah sosialisasi perundang undangan	2 kegiatan	35,000,000	35,000,000	DISKOMINFO
1.2.1.5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			jumlah aparatur yang memiliki kompetensi	12 kegiatan	jumlah aparatur yang memiliki kompetensi	12 kegiatan	100,000,000	100,000,000	DISKOMINFO
1.2.1.5.5	Pengiriman pegawai pada seminar workshop terkait dengan pelaksanaan tupoksi	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			jumlah aparatur yang mengikuti seminar/ workshop terkait pelaksanaan tupoksi	12 kegiatan	jumlah aparatur yang mengikuti seminar/ workshop terkait pelaksanaan tupoksi	12 kegiatan	107,545,000	107,545,000	DISKOMINFO
1.2.1.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.**	**meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi**	**DISKOMINFO**	**prosentase dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia**	**14 laporan/dok**					**50,225,000**	**50,225,000**	**DISKOMINFO**

1.2.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja yang tersedia	1 Dok	jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja yang tersedia	1 Dok	12,325,000	12,325,000	DISKOMINFO
1.2.1.6.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun tepat waktu	1 dok	jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun tepat waktu	1 dok	5,000,000	5,000,000	DISKOMINFO
1.2.1.6.4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang terususun tepat waktu	1 dok/laporan	jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang terususun tepat waktu	1 dok/laporan	5,000,000	5,000,000	DISKOMINFO
1.2.1.6.9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			jumlah laporan monitoring evaluasi dan pelaporan yang tersedia	12 Bulan	jumlah laporan monitoring evaluasi dan pelaporan yang tersedia	12 Bulan	27,900,000	27,900,000	DISKOMINFO
1.2.1.9	**Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD**	**Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.**	**meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi**	**DISKOMINFO**	**Tersusunnya dokumen perencanaa dan penganggaran SKPD**	**14 dokumen**					**192,470,000**	**192,470,000**	**DISKOMINFO**
1.2.1.9.1	Penyusunan data base perencanaan SKPD	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			- jumlah database perencanaan yang tersusun - fasilitasi perda penataan dan pengendalian menara telekomunikasi	6 dok	- jumlah database perencanaan yang tersusun - fasilitasi perda penataan dan pengendalian menara telekomunikasi	6 dok	149,920,000	149,920,000	DISKOMINFO

1.2.1.9.2	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	2 dok	jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	2 dok	42,550,000	42,550,000	DISKOMINFO
1.2.1.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.**	**meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi**	**DISKOMINFO**	**tersedianya data center di kabupaten pemalang**	**60 %**					**15,835,000,000**	**12,454,750,000**	**DISKOMINFO**
1.2.1.15.5	Pengadaan alat sudio dan komunikasi	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			tersedia nya peralatan studio untuk layanan multimedia	1 Paket	tersedia nya peralatan studio untuk layanan multimedia	1 Paket	90,000,000	50,000,000	DISKOMINFO
1.2.1.15.6	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			tersedianya database SIM	1 dok	tersedianya database SIM	1 dok	125,000,000	125,000,000	DISKOMINFO
1.2.1.15.7	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			tersedianya database renstra komunikasi publik	2 dokumen	tersedianya database renstra komunikasi publik	2 dokumen	130,000,000	150,000,000	DISKOMINFO
1.2.1.15.8	Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			terpeliharanya peralatan studio dan komunikasi	12 bulan	terpeliharanya peralatan studio dan komunikasi	12 bulan	65,000,000	120,000,000	DISKOMINFO

1.2.1.15.10	Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi dan tersedianya layanan internet dalam satu tahun	1 paket	terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi dan tersedianya layanan internet dalam satu tahun	1 paket	-	150,000,000	DISKOMINFO
1.2.1.15.11	Fasilitasi pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			tersedianya layanan pengadaan selama 1 tahun	12 Bulan	tersedianya layanan pengadaan selama 1 tahun	12 Bulan	350,000,000	350,000,000	DISKOMINFO
1.2.1.15.12	Penyelenggaraan ekosistem Smart City	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			tersedianya aplikasi dan infrastruktur untuk pemerintahan maupun publik guna mewujudkan smart city	4 titik hot, spot,1 paket cctv, 1 paket FO, 6 bintek smart city	tersedianya aplikasi dan infrastruktur untuk pemerintahan maupun publik guna mewujudkan smart city	44 titik hotspot, 1 paket cctv, 1 paket FO, 6 bintek smart city	4,375,000,000	5,468,750,000	DISKOMINFO
1.2.1.15.13	Pengembangan dan penyelenggaraan aplikasi berbagi pakai	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			terkoneksinya aplikasi pemerintahan untuk mewujudkan aplikasi berbagai pakai serta pelatihan interoperabilitas dan interkoneksi	8 Aplikasi	terkoneksinya aplikasi pemerintahan untuk mewujudkan aplikasi berbagai pakai serta pelatihan interoperabilitas dan interkoneksi	8 Aplikasi	1,500,000,000	1,875,000,000	DISKOMINFO

1.2.1.15.14	Pengelolaan nama domain dan sub domain daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			Terwujudnya tatakelola subdomain pemerintahan daerah yang aman dan handal serta meningkatkan parisipasi masyarakat dalam menggunakan server didalam negeri dan domain id	20 website, 20 bintek website	Terwujudnya tatakelola subdomain pemerintahan daerah yang aman dan handal serta meningkatkan parisipasi masyarakat dalam menggunakan server didalam negeri dan domain id	20 website, 20 bintek website	1,200,000,000	1,500,000,000	DISKOMINFO
1.2.1.15.15	Pengelolaan infrastruktur e-goverment, data dan informasi terintegrasi	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			terintegrasinya data dan infrastruktur komunikasi, terpusatnya database	12 bulan langganan bandwitch, 12 bulan pemeliharaan jaringan	terintegrasinya data dan infrastruktur komunikasi, terpusatnya database	12 bulan langganan bandwitch, 12 bulan pemeliharaan jaringan	8,000,000,000	2,666,000,000	DISKOMINFO
1.1.3.16	**Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi**	**Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.**	**meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi**	**DISKOMINFO**	**prosentase ASN yang memilikik kompetensi dibidang IT**	**60 %**					**708,000,000**	**710,000,000**	**DISKOMINFO**
1.1.3.16.1	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			terpenuhinya peningkatan SDM bidang kominfo	4 kegiatan	terpenuhinya peningkatan SDM bidang kominfo	4 kegiatan	225,000,000	120,000,000	DISKOMINFO
1.1.3.16.3	Asistensi/bimbingan teknis bidang manajemen komunikasi publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			jumlah aparatur yang mengikuti bintek	1 kegiatan	jumlah aparatur yang mengikuti bintek	1 kegiatan	59,000,000	60,000,000	DISKOMINFO

1.1.3.16.4	Asistensi/bimbingan teknis bidang teknik jurnalistik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			fasilitasi peningkatan aparatur pemerintah daerah dalam bidang jurnalistik	1 kegiatan	fasilitasi peningkatan aparatur pemerintah daerah dalam bidang jurnalistik	1 kegiatan	50,000,000	60,000,000	DISKOMINFO
1.1.3.16.5	Asistensi/bimbingan teknis bidang analisis data	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			jumlah aparatur pemerintah yang mengikuti bintek	2 kegiatan	jumlah aparatur pemerintah yang mengikuti bintek	2 kegiatan	90,000,000	90,000,000	DISKOMINFO
1.1.3.16.6	Asistensi/bimbingan teknis bidang komunikasi organisasi	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			jumlah aparatur pemerintah yang mengikuti bintek	1 kegiatan	jumlah aparatur pemerintah yang mengikuti bintek	1 kegiatan	85,000,000	90,000,000	DISKOMINFO
1.1.3.16.11	Sosialisasi kehumasan bagi aparatur pemerintah kabupaten pemalang	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			jumlah aparatur pemerintah daerah yang mengikuti sosialisasi kehumasan	3 kegiatan	jumlah aparatur pemerintah daerah yang mengikuti sosialisasi kehumasan	3 kegiatan	199,000,000	290,000,000	DISKOMINFO
1.1.4.17	**Program kerjasama informasi dengan mas media**	**Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.**	**meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi**	**DISKOMINFO**	**prosentase informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipublikasi kan melalui media massa**	**60 %**					**930,000,000**	**1,320,000,000**	**DISKOMINFO**
1.1.4.17.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			jumlah penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media	4 media gathering, 15 konfrensi pers, 1 presstour, 2 penayangan potensi daerah	jumlah penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media	4 media gathering, 15 konfrensi pers, 1 presstour, 2 penayangan potensi daerah	500,000,000	800,000,000	DISKOMINFO

1.1.4.17.2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			jumlah tersebarnya informasi pemerintahan daerah melalui penerbitan majalah, tabloid, koran dan terlaksananya pelayanan multimedia	5 edisi majalah, 2 edisi tabloid	jumlah tersebarnya informasi pemerintahan daerah melalui penerbitan majalah, tabloid, koran dan terlaksananya pelayanan multimedia	5 edisi majalah, 2 edisi tabloid	370,000,000	450,000,000	DISKOMINFO
1.1.4.17.3	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			terlaksananya desiminasi informasi	12 kali pemutaran film, 1 lomba fk metra tingkat kecamatan	terlaksananya desiminasi informasi	12 kali pemutaran film, 1 lomba fk metra tingkat kecamatan	60,000,000	70,000,000	DISKOMINFO
1.1.1.18	**Program penguatan kelembagaan dalam pengelolaan komunikasi dan infromasi daerah**	**Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.**	**meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi**	**DISKOMINFO**	**persentase pemerdayaan KIM**	**80 %**					**681,600,000**	**800,000,000**	**DISKOMINFO**
1.1.1.18.2	Koordinasi bidang komunikasi dan informasi lintas SKPD, lintas instansi vertikal, BUMDA dan swasta lokal	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			pembentukan dan rakor bakohumas	6 kegiatan	pembentukan dan rakor bakohumas	6 kegiatan	150,000,000	250,000,000	DISKOMINFO
1.1.1.18.5	Revitalisasi pendayagunaan media center daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			terpeliharanya pelayanan informasi dan komunikasi publik melalui media center daerah	360 upload berita	terpeliharanya pelayanan informasi dan komunikasi publik melalui media center daerah	360 upload berita	99,000,000	150,000,000	DISKOMINFO

1.1.1.18.10	Penguatan komunikasi publik melalui website dan SMS center	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			fasilitasi media center dan penguatan komunikasi publik dalam rangka pelayanan aduan masyarakat melalui website dan sms center	12 bulan layanan aduan masyarakat	fasilitasi media center dan penguatan komunikasi publik dalam rangka pelayanan aduan masyarakat melalui website dan sms center	12 bulan layanan aduan masyarakat	232,600,000	300,000,000	DISKOMINFO
1.1.1.18.11	Penguatan kelembagaan pengelolaan informasi publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			terlaksana nya fasilitas KIM dan forum TI	4 rakor KIM	terlaksana nya fasilitas KIM dan forum TI	4 rakor KIM	200,000,000	100,000,000	DISKOMINFO
1.1.2.19	**Program peningkatan tata laksana komunikasi dan informatika**	**Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.**	**meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi**	**DISKOMINFO**	**presentase SKPD yang telah memiliki website**	**100 PERSEN**					**4,748,419,500**	**3,770,000,000**	**DISKOMINFO**
1.1.2.19.3	Penyediaan dan pendayagunaan teknologi informatika dan komunikasi	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			jumlah informasi strategis dan aktual nasional melalui media masa, media baru, media tradisional, media interpersonal dan media luar ruang yang diproduksi dan didesiminasikan	4 kali rakor dan 4 kali pelatihan	jumlah informasi strategis dan aktual nasional melalui media masa, media baru, media tradisional, media interpersonal dan media luar ruang yang diproduksi dan didesiminasikan	4 kali rakor dan 4 kali pelatihan	400,000,000	400,000,000	DISKOMINFO

1.1.2.19.5	Pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet, baleho dll	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			jumlah pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster,leaflet dan baleho	10.000 poster, 10.000 leaflet, 50 baliho, 20 spanduk, 2000 kalender, 1000 booklet	jumlah pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster,leaflet dan baleho	5.000 poster, 10.000 leaflet, 50 baliho, 20 spanduk, 2000 kalender, 1000 booklet	500,000,000	350,000,000	DISKOMINFO
1.1.2.19.6	Monitoring informasi peristiwa dan pemberitaan aktual lintas daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			dokumen analisis isu pemberitaan daerah	2 dokumen	dokumen analisis isu pemberitaan daerah	2 dokumen	120,000,000	120,000,000	DISKOMINFO
1.1.2.19.7	Dokumentasi dan publikasi program/ kegiatan SKPD	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			terdokumentasi nya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah	360 kegiatan, 100 buku kliping berita, 100 buku himpunan sambutan bupati, 4 video profil, 4 video dokumenter	terdokumentasi nya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah	360 kegiatan, 100 buku kliping berita, 100 buku himpunan sambutan bupati, 4 video profil, 4 video dokumenter	500,000,000	450,000,000	DISKOMINFO
1.1.2.19.8	Pemberian informasi publik melalui iklan layanan masyarakat (adventorial)	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			Tersedianya pemberian informasi publik melalui iklan layanan masyarakat	12 rubrik bupati menjawab, 10 iklan display/kolom, 25 advertorial cetak, 1 ILPPD, 10 advertorial TV	Tersedianya pemberian informasi publik melalui iklan layanan masyarakat	12 rubrik bupati menjawab, 10 iklan display/kolom, 25 advertorial cetak, 1 ILPPD, 10 advertorial TV	1,500,000,000	350,000,000	DISKOMINFO
1.1.2.19.9	Komunikasi publik melalui dialog interaktiv, radio dan televisi	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			terfasilitasinnya komunikasi publik melalui dialog interaktiv radio dan televisi	4 dialog TV, 4 dialog saresehan bupati	terfasilitasinnya komunikasi publik melalui dialog interaktiv radio dan televisi	4 dialog TV, 4 dialog saresehan bupati	750,000,000	750,000,000	DISKOMINFO

1.1.2.19.12	Pengelolaan dan inventarisasi data dan penyajian informasi kebijakan pemerintah daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			penyusunan data informasi publik, rakor PPID dan PPID pembantu dan sangketa informasi penyediaan informasi publik	4 rakor PPID, 2 kegiatan fasilitasi sengketa informasi	penyusunan data informasi publik, rakor PPID dan PPID pembantu dan sangketa informasi penyediaan informasi publik	4 rakor PPID, 2 kegiatan fasilitasi sengketa informasi	494,177,500	750,000,000	DISKOMINFO
1.1.2.19.14	Pengelolaan program radio dan televisi daerah untuk masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			terlaksananya program radio dan televisi daerah untuk masyarakat	120 siaran puasa, 12 kali siaran lebaran, 28 kali siaran arus mudik/balik, 30 siaran langsung, 360 berita radio, 300 spot ILM, 1 fasilitasi penyelenggaraan penyiaran LPPL Radio swara Widuri	terlaksananya program radio dan televisi daerah untuk masyarakat	120 siaran puasa, 12 kali siaran lebaran, 28 kali siaran arus mudik/balik, 30 siaran langsung, 360 berita radio, 300 spot ILM, 1 fasilitasi penyelenggaraan penyiaran LPPL Radio swara Widuri	484,242,000	600,000,000	DISKOMINFO
2.14	**Statistik**										**650,000,000**	**650,000,000**	**DISKOMINFO**
1.2.3.15	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	**Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.**	**meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi**	**DISKOMINFO**	**persentase ketersediaan dokumen statistik daerah**	**40 %**					**450,000,000**	**450,000,000**	**DISKOMINFO**

1.2.3.15.1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			Berkembangnya data/informasi/statistik daerah	8 dokumen statistik daerah, 4 rakor petugas data, 1 buku metadata	Berkembangnya data/informasi/statistik daerah	8 dokumen statistik daerah, 4 rakor petugas data, 1 buku metadata	450,000,000	450,000,000	DISKOMINFO
1.2.3.15.5	Pengelolaan Data Statistik Daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			Jumlah dok kab pemalang dalam angka,jumlah dok kec dalam angka,jumlah dok PDRB kec,jumlah dok indeks harga konsumen dan laju inflasi kab pemalang,jumlah dokindikator penting pembangunan kab pemalang	2 rakor statistik, 6 narasi statistik, 1 publikasi data statistik, 4 sosialisasi statistik Tk. Kec.	Jumlah dok kab pemalang dalam angka,jumlah dok kec dalam angka,jumlah dok PDRB kec,jumlah dok indeks harga konsumen dan laju inflasi kab pemalang,jumlah dokindikator penting pembangunan kab pemalang	2 rakor statistik, 6 narasi statistik, 1 publikasi data statistik, 4 sosialisasi statistik Tk. Kec.	200,000,000	200,000,000	DISKOMINFO
2.15	**Persandian**										**793,000,000**	**820,000,000**	**DISKOMINFO**
1.2.2.15	**Program pengembangan data/informasi persandian**	**Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.**	**meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi**	**DISKOMINFO**	**presentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD**	**70 persen**					**250,000,000**	**270,000,000**	**DISKOMINFO**

1.2.2.15.1	Pengamanan komunikasi dan informasi	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			terwujudnya penyelenggaraan keamanan informasi	12 bulan fasilitasi konsultasi keamanan informasi, 1 sosialisasi keamanan informasi, 1 studi invetarisasi implementasi SMPI, 1 paket layanan sertifikasi SSL, 2 kunci digital	terwujudnya penyelenggaraan keamanan informasi	12 bulan fasilitasi konsultasi keamanan informasi, 1 sosialisasi keamanan informasi, 1 studi invetarisasi implementasi SMPI, 1 paket layanan sertifikasi SSL, 2 kunci digital	250,000,000	270,000,000	DISKOMINFO
1.2.2.15.2	Penyelenggaraan kemananan informasi	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	DISKOMINFO			terselenggaranya pelayanan publik yang aman handal, percaya dan bertanggungjawab	12 bulan, 1 paket web apolication firewall	terselenggaranya pelayanan publik yang aman handal, percaya dan bertanggungjawab	12 bulan, 1 paket web apolication firewall	543,000,000	550,000,000	DISKOMINFO
JUMLAH TOTAL											**26,301,508,500**	**22,480,239,000**	

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2019 mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016 - 2021 dan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2018. Renja ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Pemalang, sehingga target kinerja pada akhir tahun periode Renstra dapat tercapai.

Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan tiga urusan yaitu urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian. Urusan Komunikasi dan Informatika diprioritaskan pada penyediaan layanan komunikasi dan informasi publik, layanan infrastruktur komunikasi, dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Urusan statistic diprioritaskan untuk penyediaan layanan satu data, dan Urusan Persandian diprioritaskan untuk layanan keamanan informasi.

Program dan kegiatan yang disusun dalam Renja ini merupakan program dan kegiatan yang bersifat indikatif, sehingga dalam pelaksanaannya akan sangat tergantung pada kondisi, regulasi, prioritas, dan ketersediaan anggaran pemerintah daerah pada tahun anggaran bersangkutan.

Pemalang, Agustus 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG

PEMERINTAH KABUPATEN DISKOMINFO PEMALANG

Drs.NUGROHO BUDI RAHARJO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610821 198903 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PERATURAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 050.4/ 140 /2018

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PEMALANG

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Nomor 050.3/24/2017 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2016 -2021;
c. bahwa sebagai tindak lanjut peraturan tersebut pada huruf b, perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Tahunan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;

Jalan Surohadikusumo no 1
P E M A L A N G

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2016 – 2021

Jalan Surohadikusumo no 1
P E M A L A N G

19. Peraturan bupati Pemalang Nomor 104 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017;
20. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 44 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

KEDUA : Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini disusun sebagai acuan dalam melaksanakan program kegiatan dan anggaran pembangunan Tahun 2019.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terjadi perubahan atas kondisi pelaksanaan program dan kegiatan akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **Pemalang**
pada tanggal September 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN PEMALANG

PEMERINTAH KABUPATEN DISKOMINFO PEMALANG

Drs. NUGROHO BUDI RAHARJO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610821 198903 1 003

Jalan Surohadikusumo no 1
P E M A L A N G

Jalan Surohadikusumo no 1
P E M A L A N G